

**PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN, STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu akuntansi Syariah**



Oleh:

Muhammad Tegar Surya Sudarsono

2105046035

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Tegar Surya Sudarsono
NIM : 2105046035
Judul : PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal : 18 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026

Semarang, 25 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Riska Wijayanti, M.H

NIP. 199304082019032019

Penguji I

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.

NIP. 196701191998031002

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.

NIP. 197004101995031001

Sekretaris Sidang

Naili Sa'adah, M.Si

NIP. 198803312019032012

Penguji II

Mashital, M.Si

NIP. 198405162019031005

Pembimbing II

Naili Sa'adah, M.Si

NIP. 198803312019032012



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Skripsi

A.n. Muhammad Tegar Surya Sudarsono

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan perbaikan seperlunya,
dengan naskh ini saya menngrimkan naskah naskah saudara:

Nama : Muhammad Tegar Surya Sudarsono

NIM : 2105046035

Judul : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem
Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Budaya
Organisasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Jepara)

Dengan ini kami mohon skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Juni 2025

Pembimbing I

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 197004101995031001

Pembimbing II

Naili Sa'adah, M.Si.
NIP. 198803312019032012

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya, penulis berhasil merampungkan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik yang syafaatnya kelak kita nantikan. Karya tulis ilmiah ini penulis dedikasikan untuk:

1. Ayahanda Sudarsono A Sodiq dan Ibunda Hidarwati, sosok teladan dan pahlawan sejati dalam kehidupan penulis. Berkat curahan kasih sayang, pengorbanan tiada tara, serta doa yang tak pernah putus, penulis mampu menuntaskan jenjang pendidikan ini. Kesabaran dan cinta kasih Ayah dan Ibu menjadi landasan kokoh dalam setiap jejak langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan usia yang panjang, kesehatan paripurna, serta rezeki yang berlimpah berkah kepada keduanya.
2. Titiani Mutiara Sudarsono, adik terkasih yang senantiasa menjadi sumber inspirasi, penguat semangat, dan pemberi dukungan tulus ikhlas. Semoga engkau selalu dilancarkan dan meraih kesuksesan dalam menempuh pendidikan di MAN 2 Kudus.
3. Segenap keluarga besar Mbah Kakung Surjono dan Mbah Putri Masri, yang tak henti memberikan doa restu dan petuah bijaksana yang sangat berharga. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan beliau semua.
4. Seluruh rekan seperjuangan dan sahabat-sahabat terbaik, yang telah bersama-sama melewati suka duka, saling berbagi gagasan, bertukar ilmu, dan memberi masukan konstruktif. Kehadiran kalian mewarnai perjalanan ini dan menjadikannya lebih bermakna. Terima kasih telah menjadi teman setia dalam perjalanan ini. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai langkah kalian di masa depan, dan semoga Allah SWT membukakan jalan terbaik bagi kalian semua dalam meraih impian dan cita-cita.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Tegar Surya Sudarsono
NIM : 2105046035
Jurusan : S1. Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul skripsi : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkai Daerah Kabupaten Jepara)

Dengan ini saya menyatakan dengan jujur bahwa skripsi ini merupakan hasil kinerja saya sendiri; dan tidak mengandung hasil karya arang laji yang diterbitkan oleh suatu perguruan tinggi maupun lembaga pendaikan lainnya, Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan lembaga lainnya dijadikan sebagai rujukan serta dijelaskan di dalam refrensi yang tertera dalam kulipan dan daftar pustaka

Semarang. Juni 2025

Deklarator



NIM.2105046035

MOTTO

“Berusaha, Berdoa, dan Berikhtiar”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya... ” Q.S Al Baqarah: 286*

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE LATIN

Alih aksara, atau transliterasi, merujuk pada metode pengubahan sistem penulisan dari satu aksara ke aksara lainnya. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, seringkali ditemui berbagai istilah yang berasal dari bahasa Arab, mencakup nama individu, judul referensi, nama institusi, serta beragam terminologi lainnya. Oleh karena itu, pengalihaksaraan istilah-istilah tersebut ke dalam huruf Latin menjadi suatu kebutuhan. Untuk memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penulisan, ditetapkanlah panduan alih aksara berikut sebagai rujukan utama:

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ء	'	ڙ	z	ڧ	q
ٻ	b	ڱ	s	ڻ	k
ڦ	t	ڙ	sy	ڻ	l
ڻ	ts	ڻ	sh	ڻ	m
ڇ	j	ڻ	dl	ڻ	n
ڻ	h	ڻ	t̪	ڻ	w
ڻ	kh	ڻ	z̪	ڻ	h
ڏ	d	ڏ	"	ڏ	y
ڏ	dz	ڏ	gh		
ڙ	r	ڙ	f		

B. Vokal Tunggal

- Bunyi vokal fathah (ـ) dialihkan menjadi **a**.
- Bunyi vokal kasrah (ـ) dialihkan menjadi **i**.
- Bunyi vokal dhammah (ـ) dialihkan menjadi **u**.

C. Vokal Rangkap (Diftong)

- Gabungan bunyi vokal يِ dialihkan menjadi **ay**.
- Gabungan bunyi vokal وِ dialihkan menjadi **aw**.

D. Tasydid (Syaddah)

Tasydid, yang menandakan penekanan atau penggandaan konsonan, dalam alih aksara Latin direpresentasikan dengan penulisan konsonan ganda. Sebagai ilustrasi, kata الطِّبْبُ dialihaksarakan menjadi *al-tibb*.

E. Partikel Sandang Definitif (الـ)

Partikel sandang definitif dalam bahasa Arab, yaitu الـ (alif lam), dialihaksarakan menjadi "al-" dan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, kata الصَّنَاعَةُ dialihkan menjadi *al-ṣinā'ah*. Penulisan "al-" menggunakan huruf kecil, kecuali jika partikel tersebut mengawali sebuah kalimat, maka ditulis dengan huruf kapital ("Al-").

F. Ta' Marbūtah (ة)

Huruf *ta' marbūtah* (ة) yang berada di akhir kata dan berfungsi sebagai penanda feminin atau dalam kondisi *waqaf* (berhenti), dialihaksarakan dengan huruf "h". Sebagai contoh, frasa المَعِيشَةُ الطَّبِيعِيَّةُ dialihkan menjadi *al-ma'tsyah al-tabī'iyyah*.

ABSTRAK

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada publik dan pihak terkait. Penyusunan LKPD yang berkualitas merupakan wujud akuntabilitas dalam mencapai tujuan organisasi. LKPD Kabupaten Jepara telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 tahun berturut-turut. penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD Kabupaten Jepara, sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menguji kembali variabel yang menunjukkan temuan inkonsisten serta menambahkan variabel baru seperti budaya organisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda, serta pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian, sistem pengendalian internal ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan , dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

Kata Kunci: *Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT, Pencipta dan Pemelihara alam semesta, atas limpahan rahmat, petunjuk, serta pertolongan-Nya yang tiada tara, penulis akhirnya dapat merampungkan karya ilmiah skripsi yang berjudul: "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara)". Untaian shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat, yang syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari kontribusi, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menghaturkan apresiasi dan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, atas kepemimpinan serta fasilitas yang telah menunjang proses akademik.
2. Dr. Nur Fatoni, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, atas segala dukungan akademis yang diberikan.
3. Bapak Warno, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Syariah, beserta Ibu Naili Sa'adah, M.Si., Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah, atas segala motivasi dan bimbingan, baik secara administratif maupun akademis.
4. Tim Pembimbing Skripsi: Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. (Pembimbing I) dan Ibu Naili Sa'adah, M.Si. (Pembimbing II), yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Mujiyono, MA., selaku Dosen Wali, atas segala dorongan moril, motivasi, serta arahan yang sangat berarti selama masa perwalian.
6. Segenap Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, atas ilmu dan pengetahuan yang telah dibagikan.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara, atas izin yang diberikan untuk pelaksanaan penelitian.
8. Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), atas kerja sama yang sangat membantu selama proses pengumpulan data penelitian.

9. Keluarga tercinta penulis (kedua orang tua dan adik), atas doa restu yang tiada henti, serta dukungan moril dan materiel yang tak ternilai harganya.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan: Syahril Sidiq, Candra Nur, Ega Rizky, Sahid Riadi, Sofyan Yahya, Aisyahdw, Sriayu, Alfiati, Sulis, dan Fatiha, atas semangat, dukungan, serta kebersamaan yang telah terukir.
11. Seluruh rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Angkatan 2021 (AKS-A), atas kontribusinya dalam menciptakan atmosfer akademis yang suportif dan penuh dinamika.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki berbagai keterbatasan. Meskipun demikian, penulis menaruh harapan besar agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan serta membawa manfaat yang signifikan bagi para pembacanya.

Semarang, Juni 2025

Penulis

Muhammad Tegar Surya Sudarsono

NIM.2105046035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PENGESAHAN.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PERSEMBAHAN	IV
DEKLARASI.....	V
MOTTO	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VII
HURUF ARAB KE LATIN	VII
ABSTRAK	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XV
DAFTAR TABEL	XVI
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	10
1.3 TUJUAN PENELITIAN	11
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	11
1.4.1 Bagi Peneliti	12
1.4.2 Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	12
1.4.3 Bagi Kajian Penelitian Berikutnya.....	12
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 KERANGKA TEORI.....	14
2.1.1 Agency Theory (Teori Keagnean)	14
2.1.2 Pemerintah Daerah	17
2.1.3 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik (Pemerintahan) dan Perusahaan	19
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan.....	21
2.1.5 Budaya organisasi.....	23
2.1.5 Kompetensi sumber daya manusia.....	27
2.1.6 Sistem informasi akuntansi	29
2.1.7 Sistem pengendalian internal	34
2.1.8 Standar akuntansi pemerintahan	38
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	41

2.3 RUMUSAN HIPOTESIS	51
2.3.1 Pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas laporan keuangan	51
2.3.2 Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan	52
2.3.3 Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan	54
2.3.4 Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan ..	56
2.3.5 Pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan	57
2.4 KERANGKA BERPIKIR.....	60
BAB III	61
METODE PENELITIAN	61
3.1 METODE PENELITIAN	61
3.2 POPULASI PENELITIAN	61
3.3 SAMPEL PENELITIAN	63
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	64
3.5 INSTRUMEN PENELITIAN	64
3.6 UJI KELAYAKAN INSTRUMEN	68
3.6.1 Uji Validitas	68
3.6.2 Uji Reliabilitas.....	68
3.7 UJI ASUMSI KLASIK	69
3.7.1 Uji Normalitas	69
3.7.2 Uji Multikolinearitas.....	69
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas	70
3.8 UJI HIPOTESIS	70
3.8.1 Analisis Regresi Linier Berganda	70
3.8.2 Uji F Simultan	71
3.8.3 Uji T parsial.....	71
3.8.4 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R).....	72
BAB IV.....	73
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	73
4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	73
4.2 KARAKTERISTIK RESPONDEN	75
4.2.1 karakteristik responden berdasarkan usia.....	75
4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan jumlah kelamin	75
4.2.4 Karakteristik berdasarkan masa kerja	76
4.3 ANALISIS DESKRIPTIF.....	77
4.3.1 Analisis deskriptif variable	77
4.4. HASIL UJI KELAYAKAN INSTRUMEN.....	79
4.4.1 Uji Validitas	79
4.4.2 Uji Reabilitas	81
4.5 HASIL UJI ASUMSI KLASIK.....	81
4.5.1 Uji Normalitas Data.....	81
4.5.2 Uji Multikolinearitas.....	83
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	85

4.6 ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA	86
4.7 UJI HIPOTESIS PENELITIAN.....	89
4.7.1 Uji Simultan (Uji F).....	89
4.7.2 Uji Parsial (Uji t)	89
4.8 UJI KOEFISIEN DETERMINASI.....	92
4.9 PEMBAHASAN	93
4.9.1 Pengaruh Budaya Organisasi (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).....	93
4.9.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).....	95
4.9.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).....	97
4.9.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	100
4.9.5 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (X5) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	102
BAB V	106
PENUTUP	106
5.1 KESIMPULAN	106
5.2 KETERBATASAN PENELITIAN	107
5.3 SARAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	115
LAMPIRAN 1. KUESIONER PENELITIAN	115
LAMPIRAN 2. TABULASI DATA	123
LAMPIRAN 3. UJI KELAYAKAN INSTRUMEN	129
LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 laporan hasil pemeriksaan LKPD	7
Gambar 2. 1 Kerangka berpikir	60
Gambar 4. 1 Grafik Normal Probability Plot	82

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Populasi Penelitian	62
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel	65
Tabel 4. 1 Karakteristik responden berdasarkan usia	75
Tabel 4. 2 Karakteristik responden berdasarkan jumlah kelamin	75
Tabel 4. 3 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan	76
Tabel 4. 4 Karakteristik responden berdasarkan masa kerja	76
Tabel 4. 5 Hasil uji statistik deskriptif	77
Tabel 4. 6 Hasil uji validitas	79
Tabel 4. 7 Hasil uji reabilitas	81
Tabel 4. 8 Hasil uji normalitas - One sample kolmogrov smirnov test	82
Tabel 4. 9 Hasil Uji multikolinearitas	83
Tabel 4. 10 Hasil Uji heteroskedastisitas	85
Tabel 4. 11 Hasil uji hipotesis - uji regresi linear berganda.....	86
Tabel 4. 12 Hasil uji hipotesis - uji simultan (Uji F)	89
Tabel 4. 13 Hasil Uji hipotesis - uji parsial (Uji T)	90
Tabel 4. 14 Hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R Square).....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik adalah entitas yang bertujuan untuk menyediakan atau memproduksi barang-barang publik. Tujuan dari organisasi sektor publik berbeda dengan tujuan yang dimiliki oleh organisasi sektor swasta. Dari perspektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang berfokus pada upaya untuk memproduksi barang dan layanan publik guna memenuhi kebutuhan serta hak Masyarakat¹. Sektor publik, yang seringkali merujuk pada lembaga pemerintah atau perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh negara, memiliki peran krusial dalam menyediakan layanan untuk masyarakat. Tanggung jawab mereka mencakup peningkatan kesejahteraan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan, hingga kebebasan dalam menjalankan ibadah serta berbagai kebutuhan publik lainnya. Di Indonesia, organisasi-organisasi dalam sektor publik kini menghadapi tuntutan yang semakin meningkat terkait akuntabilitas, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di daerah. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik². Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena: (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat

¹ Asnah Dyanasari, “Pengantar Ilmu Ekonomi Makro,” *Yogyakarta: Deepublish*, 2021.

² Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, and Dania Puspitasari, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang),” *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* 10, no. 1 (2018): 105–12.

berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut³.

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam menjalankan pemerintahan, kewajiban ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu langkah nyata untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Dalam perspektif ajaran Islam, manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal memiliki kewenangan untuk mengelola serta memelihara sumber daya yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT dengan cara yang paling optimal. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullāh bin ‘Umar, Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَّا مَامُومُ
الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجَهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى
مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ لَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).⁴

³ Partono, “Laporan Keuangan Pemerintah: Upaya Menuju Transparansi Dan Akuntabilitas,” *Media Akuntansi*, 2000.

⁴ <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw> (Diakses pada 6 Maret 2025 pukul 20.53)

Berdasarkan hadis yang disebutkan, salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahan melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) adalah menyampaikan laporan keuangan terkait penggunaan sumber daya ekonomi selama pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Laporan ini wajib diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat setempat. Untuk memastikan kredibilitas dan kepercayaan publik, laporan keuangan tersebut harus memenuhi prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan transparansi (keterbukaan), mencakup informasi alokasi dana, posisi keuangan, serta seluruh transaksi yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Laporan ini disusun berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang kemudian menjadi dasar penyusunan laporan keuangan tahunan. Laporan tahunan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai rangkaian dokumen yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan pemerintah daerah secara komprehensif.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental yang saling melengkapi dalam tata kelola organisasi publik. Akuntabilitas mencerminkan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan organisasi kepada pihak yang berwenang, sementara transparansi menekankan pada keterbukaan informasi dan akses terhadap proses pengambilan keputusan kepada pemangku kepentingan. Putri dan Subardjo (2017) mengklasifikasikan akuntabilitas publik menjadi dua dimensi: akuntabilitas vertikal yang mengatur pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi (seperti pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat), dan akuntabilitas horizontal yang mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat luas⁵. Kedua dimensi akuntabilitas ini

⁵ Ridha Rahmadita Putri and Anang Subardjo, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6, no. 12 (2017).

memerlukan transparansi sebagai mekanisme pendukung utama dalam penyampaian informasi kepada publik.

Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi pemerintah memerlukan beberapa komponen penting yang saling terintegrasi. Pertama, sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kesesuaian tindakan dengan regulasi. Kedua, mekanisme pelaporan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, sistem evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat, infrastruktur teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi. Komponen-komponen ini menjadi landasan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik.

Kualitas laporan keuangan menjadi manifestasi konkret dari penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya menyajikan informasi sesuai standar akuntansi, tetapi juga harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami⁶. Karakteristik relevansi menekankan bahwa informasi yang disajikan harus memiliki nilai prediktif dan nilai umpan balik yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna. Keandalan laporan tercermin dari penyajian informasi yang bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat diverifikasi kebenarannya. Aspek komparabilitas memungkinkan pengguna untuk membandingkan kinerja keuangan antar periode maupun antar entitas, sehingga dapat menilai tren dan perkembangan pengelolaan keuangan. Kemudahan pemahaman menjadi faktor penting agar informasi keuangan dapat diakses dan dimengerti oleh berbagai pemangku kepentingan. Karakteristik-karakteristik ini secara kolektif menjadi prasyarat fundamental

⁶ Sintike Mentari Modo, David Paul Elia Saerang, and Agus Tony Poputra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud),” *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING " GOODWILL "* 7, no. 2 (2016).

agar laporan keuangan dapat berfungsi efektif sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus relevan dan memenuhi kebutuhan para pengguna. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi⁷.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang penting. Karakteristik pertama adalah relevan, yang mencakup beberapa unsur penting. Informasi harus memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) yang memungkinkan pengguna mengevaluasi dan memperbaiki ekspektasi masa lalu mereka. Selain itu, informasi juga harus memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) yang membantu pengguna dalam memperkirakan masa depan berdasarkan hasil sebelumnya dan kondisi saat ini. Ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyajian informasi juga crucial karena dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Kelengkapan informasi menjadi aspek terakhir dari relevansi, di mana setiap informasi utama harus disertai penjelasan yang jelas untuk menghindari kesalahan penggunaan. Karakteristik kedua adalah keandalan informasi, yang sangat bergantung pada kemampuannya mencerminkan keadaan atau peristiwa secara akurat. Tingkat keandalan dapat bervariasi tergantung pada pemahaman pengguna terhadap aturan dan standar yang berlaku. Informasi dianggap andal jika memenuhi tiga kriteria: dapat diuji kebenarannya (*verifiable*) oleh berbagai pihak dengan metode yang sama dan menghasilkan hasil yang konsisten, bersifat netral dalam penyajiannya tanpa

⁷ Ceacilia Srimindarti, "Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan," *Fokus Ekonomi* 7, no. 1 (2008): 24451.

memihak kepada kelompok tertentu, serta disajikan secara wajar dan jujur (*representational faithfulness*) dengan menggambarkan keadaan secara akurat dan lengkap. Karakteristik ketiga adalah komparabilitas, di mana informasi dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas lain. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis tren dan membuat perbandingan yang bermakna. Karakteristik terakhir adalah kemudahan pemahaman, yang mengharuskan informasi dalam laporan keuangan disajikan dalam bentuk dan menggunakan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman penggunanya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi dapat dimanfaatkan secara efektif oleh berbagai pemangku kepentingan.

Dengan demikian, pemerintah daerah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pemerintah telah melakukan pembaruan dalam sistem pengelolaan keuangan melalui penerbitan beberapa undang-undang penting. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa kepala daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Laporan keuangan ini harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Selanjutnya, melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004, terjadi perubahan signifikan dalam sistem akuntabilitas pemerintah daerah. Perubahan ini menggeser arah pertanggungjawaban yang semula bersifat vertikal (kepada pemerintah pusat) menjadi horizontal (kepada masyarakat dengan DPRD sebagai wadah perwakilannya).

Setiap tahun, BPK (Badan Pengawas Keuangan) melakukan evaluasi dan memberikan penilaian berupa opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut telah disajikan secara berkualitas dan memenuhi standar

kewajaran dalam pengungkapannya. Dalam melakukan penilaian, BPK memiliki empat jenis opini yang dapat diberikan. Tingkatan opini tersebut terdiri dari: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai penilaian tertinggi, WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar), dan TMP (Tidak Memberi Pendapat) yang merupakan tingkatan terendah dimana BPK menolak memberikan opini atas laporan keuangan yang diperiksa. Ketika membahas tentang pelaporan keuangan pemerintah dan kandungan informasi di dalamnya, muncul pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai kualitasnya. Salah satu pertanyaan utama adalah apakah pelaporan tersebut telah sesuai dengan standar kompetensi informasi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Lebih spesifik lagi, timbul pertanyaan tentang kualitas komponen-komponen utama laporan keuangan yang disebutkan dalam UU No 17 Tahun 2003, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perlu dikaji apakah komponen-komponen tersebut telah memenuhi empat kriteria penting dalam pelaporan keuangan: relevansi, keandalan, komparabilitas (dapat dibandingkan), dan kemudahan untuk dipahami.

Gambar 1. 1 laporan hasil pemeriksaan LKPD

Pemeriksaan	PERIODE												SIFAT PERWAKILAN =	HASIL PEMERIKSAAN =	PUBLIKASI =	DPO PERWAKILAN =
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
1 Kab. Bangkalan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				
2 Kab. Banyumas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				
3 Kab. Batang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP											
4 Kab. Blora	WDP	WTP														
5 Kab.Boyolali	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				
6 Kab. Brebes	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP				
7 Kab. Cilacap	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP											
8 Kab. Dompu	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP											
9 Kab. Grobogan	WDP	WDP	WTP													
10 Kab. Jepara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				

Fenomena yang menarik dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari prestasi Pemerintah Kabupaten Jepara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk keempatbelas kalinya secara berturut-turut⁸. Raihan positif atas laporan keuangan tetap dipertahankan sejak tahun 2009 lalu⁹. Raihan prestasi merupakan terbanyak antar kabupaten di Jawa Tengah, ini menunjukkan konsistensi dari dalam pengelolaan keuangan yang baik, meskipun pada tahun 2023 diberikan dengan catatan penekanan pada satu hal tertentu. Penjabat Bupati Jepara, Edy Supriyanta menekankan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja sama yang solid antara jajaran Pemerintah Kabupaten Jepara dan DPRD Jepara¹⁰.

Keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP selama empat belas tahun berturut-turut bukanlah hal yang mudah, mengingat adanya berbagai dinamika yang harus dihadapi dan disesuaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan harapan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Hari Wiwoho, agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat menjadi pendorong dan motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sulaiman (2022)¹¹ tentang pengaruh kompetensi SDM, sistem teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jepara.

⁸ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, "Jepara Terima Opini WTP Kali Keempatbelas," Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 4 Mei 2024, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/jepara-terima-opini-wtp-kali-keempatbelas/>, diakses pada 15 Januari 2025

⁹ <https://dprd.jepara.go.id/raih-predikat-wtp-ke-14-tahun-2023-ketua-dprd-jepara-siap-tindaklanjuti-catatan-bpk/>, diakses pada 20 mei 2025

¹⁰ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/penjabat-bupati-jepara-raih-apresiasi-kinerja-penjabat-kepala-daerah-2024/>, diakses pada 21 mei 2025

¹¹ Rachmat Luthfi Sulaiman and Nashirotun Nisa Nurharjanti, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

Pengembangan dilakukan dengan menambahkan variabel budaya organisasi sebagai variabel independen berdasarkan temuan Rahman (2024) yang mengungkapkan peran krusial budaya organisasi dalam mendukung tata kelola yang baik dan menghasilkan laporan keuangan yang andal¹². Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan (2) menguji kembali temuan Sulaiman (2022)¹³ yang menyatakan bahwa kompetensi SDM dan sistem akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan¹⁴.

Temuan tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Nurillah (2014)¹⁵, Wati et al. (2014)¹⁶, dan Maysaroh dan Wahyono (2018)¹⁷ yang membuktikan adanya pengaruh positif kedua variabel tersebut. Penambahan variabel budaya organisasi didukung oleh hasil penelitian Rahman (2024)¹⁸ yang menemukan bahwa budaya organisasi yang menekankan nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas berperan penting dalam mencegah kecurangan laporan keuangan melalui peningkatan nilai etika dan monitoring berkala¹⁹.

¹² & M. Masrukhan. Dewi Yesiana Rahman, Erlin Rohmawati, Ninis Sriyani, “PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN,” *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 11, no. 7 (2024): 110–120., <https://doi.org/10.8734/musytari.v11i7.8228>.

¹³ Sulaiman and Nurharjanti, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara).”

¹⁴ Sulaiman and Nurharjanti.

¹⁵ As Syifa Nurillah and Dul Muid, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)” (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014).

¹⁶ wati et al., “Pengaruh_Kompetensi_SDM_Penerapan_Sap_Da” 2 (2014).

¹⁷ Katin Wilda Maysaroh and M A Wahyono, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Pada SKPD ” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

¹⁸ Dewi Yesiana Rahman, Erlin Rohmawati, Ninis Sriyani, “PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN.”

¹⁹ Dewi Yesiana Rahman, Erlin Rohmawati, Ninis Sriyani.

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada prestasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 14 tahun berturut-turut. Sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Kota Ukir, Kabupaten Jepara memiliki potensi pendapatan asli daerah yang signifikan dari sektor industri ukir, sehingga membutuhkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Keberhasilan Kabupaten Jepara dalam mengelola laporan keuangan daerah yang didukung oleh kompetensi SDM, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, budaya organisasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, menjadikan Kabupaten Jepara sebagai role model bagi pemerintah daerah lainnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menambahkan variabel budaya organisasi untuk memberikan perspektif baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini berjudul " PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara?

2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara?
3. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara?
4. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara?
5. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
3. Untuk menganalisis pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
4. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Informasi akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
5. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mendalam tentang praktik akuntansi sektor publik, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan kemampuan analisis dalam mengkaji hubungan antara kompetensi SDM, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, budaya organisasi, dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4.2 Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi OPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dapat membantu OPD dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia, meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi, dan memperkuat sistem pengendalian intern merupakan langkah penting dalam menciptakan organisasi yang efisien. Selain itu, mengembangkan budaya organisasi yang mendukung dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan juga sangat krusial.

1.4.3 Bagi Kajian Penelitian Berikutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi sektor publik. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang pentingnya mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta membuka peluang untuk pengembangan penelitian dengan menambahkan variabel lain atau memperluas cakupan penelitian pada konteks yang berbeda.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terdiri atas lima BAB, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, definisi operasional variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian, deskripsi statistik data dan metode analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Agency Theory (Teori Keagnewan)

Agency Theory merupakan suatu teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu principal dan agent²⁰. Teori ini menerangkan hubungan kontraktual antara satu pihak sebagai principal yang mengamanatkan wewenang kepada pihak lain sebagai agent agar dapat menjalankan suatu pekerjaan serta membuat keputusan terbaik dengan atas nama principa²¹. Permasalahan teori ini adalah adanya asimetri informasi dan perbedaan. Menurut Mardiasmo akuntabilitas public adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut²². Akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi dua bentuk utama. Pertama adalah akuntabilitas vertikal, di mana terdapat kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Kedua adalah akuntabilitas horizontal, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat secara luas.

Dalam konteks teori keagenan, sistem pelaporan keuangan di sektor publik mencerminkan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Sebagai agen, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi keuangan yang berkualitas dan berguna. Informasi ini digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan (prinsipal) baik secara langsung maupun melalui perwakilan mereka untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas pemerintah

²⁰ F X Anton, “Menuju Teori Stewardship Manajemen,” *Majalah Ilmiah Informatika* 1, no. 2 (2010).

²¹ Michael C Jensen and William H Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” in *Corporate Governance* (Gower, 2019), 77–132.

²² M B A Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru* (Penerbit Andi, 2021).

dan mengambil berbagai keputusan strategis, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan²³. Hubungan antara teori keagenan (agency theory) dan konsep pertanggungjawaban juga memiliki landasan dalam perspektif Islam, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang diperlakukan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga amanah dan menghindari pengkhianatan, yang sejalan dengan prinsip dasar dalam teori keagenan. Dalam konteks pemerintahan, ayat ini dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat (principal) dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab." Hubungan keagenan dalam sektor publik tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga mengandung dimensi moral dan etika yang kompleks. Menurut Eisenhardt, konflik kepentingan antara principal dan agent sering muncul ketika agent memiliki insentif untuk memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sementara principal menginginkan optimalisasi kepentingan publik²⁴. Misalnya, dalam pengelolaan anggaran daerah, pemerintah (agent) mungkin cenderung mengalokasikan dana untuk proyek fisik yang terlihat "menarik" secara politis, meskipun masyarakat (principal) lebih membutuhkan program peningkatan kualitas pendidikan atau kesehatan. Fenomena ini dikenal sebagai political budget cycle, di mana kebijakan anggaran didorong oleh motif

²³ Faristina Rosalin and Warsito Kawedar, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada BLU Di Kota Semarang)" (Universitas Diponegoro, 2011).

²⁴ Kathleen M Eisenhardt, "Building Theories from Case Study Research," *Academy of Management Review* 14, no. 4 (1989): 532–50.

politik jangka pendek, bukan kebutuhan riil masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat, seperti audit kinerja oleh BPK dan partisipasi aktif masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Asimetri informasi dalam hubungan keagenan juga menciptakan risiko adverse selection (pemilihan agent yang tidak kompeten) dan moral hazard (penyalahgunaan wewenang setelah kontrak disepakati). Dalam konteks pemerintahan, hal ini tercermin dari kasus korupsi dana bansos COVID-19 di Indonesia pada 2020²⁵, di mana oknum pejabat menyalahgunakan wewenangnya karena minimnya transparansi dalam distribusi dana. Menurut Fama dan Jensen (1983)²⁶, solusi untuk memitigasi risiko ini adalah melalui penguatan sistem kontrol dan penggunaan insentif yang sejalan. Contohnya, penerapan sistem digitalisasi laporan keuangan berbasis *blockchain* dapat meningkatkan akurasi dan transparansi data, sementara penghargaan bagi daerah dengan indeks akuntabilitas tertinggi (seperti Anugerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP) menjadi insentif positif bagi agent untuk meningkatkan kinerja. Perkembangan teknologi dan tuntutan good governance telah memperluas dimensi teori keagenan. Inisiatif seperti Open Government Data (OGD) di Indonesia, yang mempublikasikan data keuangan pemerintah secara real-time, merupakan upaya mengurangi asimetri informasi dan mendorong partisipasi publik sebagai bentuk social control. Di sisi lain, konsep Smart Governance berbasis artificial intelligence (AI) mulai diadopsi untuk memprediksi risiko penyimpangan anggaran dan meningkatkan akurasi pelaporan. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait kesenjangan digital dan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi keuangan teknis. Oleh karena itu, teori keagenan perlu dipahami sebagai dinamika yang terus berevolusi, di

²⁵ <https://kalteeng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Polisi-Temukan-102-Penyelengangan-Dana-Bansos-Covid-19.pdf> diakses pada 8 maret 2025 pukul 14.03

²⁶ Eugene F Fama and Michael C Jensen, “Separation of Ownership and Control,” *The Journal of Law and Economics* 26, no. 2 (1983): 301–25.

mana prinsip dasar akuntabilitas harus diadaptasi dengan konteks teknologi dan budaya lokal.

2.1.2 Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana pemerintahan yang menjalankan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilaksanakan dalam kerangka otonomi luas yang tetap mengutamakan kesatuan Negara Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Struktur pemerintahan daerah mencakup Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta seluruh perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di semua tingkatan diatur melalui undang-undang dengan memperhatikan karakteristik khusus dan keragaman setiap daerah. Dalam pelaksanaannya, aspek keuangan, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara berkeadilan dan seimbang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah bersama DPRD menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan berpedoman pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan, yang tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada ketersediaan sumber pendapatan yang memadai, yang diatur melalui mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Besaran pendapatan ini disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara kedua pihak. Seluruh sumber keuangan yang terkait dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi bagian integral dari keuangan daerah. Dalam hal ini, daerah memiliki hak untuk memperoleh pendanaan dari pemerintah pusat, memungut dan mengelola pajak serta retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di wilayahnya, menerima dana perimbangan, serta mengelola kekayaan daerah dan sumber pendapatan sah lainnya. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dalam menjalankan pemerintahan secara efektif dan berkelanjutan.

Undang-Undang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan manifestasi dari kekuasaan pemerintahan. Dalam konteks desentralisasi, Presiden mendelegasikan sebagian wewenang pengelolaan keuangan negara kepada gubernur, bupati, atau walikota selaku kepala daerah. Delegasi ini mencakup kewenangan mengelola keuangan daerah serta mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang bersifat terpisah. Implikasi hukum dari ketentuan ini adalah bahwa kepala daerah memegang otoritas penuh dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus memiliki tanggung jawab atasnya sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, kepala daerah berwenang untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan keuangan tersebut kepada pejabat perangkat daerah. Mekanisme ini menjamin keterpaduan antara pengaturan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan sistem pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, struktur pendapatan daerah diklasifikasikan ke dalam tiga komponen utama. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari:

- (1) penerimaan pajak daerah;
- (2) retribusi daerah;
- (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah; serta

(4) sumber-sumber penerimaan sah lainnya. Kedua, dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga, berbagai penerimaan sah lainnya yang menjadi hak daerah. Seluruh transaksi keuangan daerah wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dikelola melalui mekanisme kas daerah oleh Bendahara Umum Daerah. Proses perencanaan, implementasi, administrasi, pelaporan, pengawasan, dan akuntabilitas keuangan

daerah diatur melalui Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

2.1.3 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik (Pemerintahan) dan Perusahaan

Akuntansi sektor publik dan perusahaan memiliki perbedaan mendasar yang bersumber dari tujuan, fungsi, dan karakteristik operasional masing-masing entitas. Dalam konteks sektor publik, akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan Keputusan ekonomi, sosial dan politik²⁷. Laporan keuangan pemerintah dirancang untuk menilai kepatuhan terhadap anggaran, efisiensi penggunaan dana publik, serta pencapaian tujuan sosial-ekonomi seperti penanggulangan kemiskinan atau peningkatan akses pendidikan. Sebagai contoh, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi instrumen kritis untuk memverifikasi bahwa dana dialokasikan sesuai peraturan yang berlaku. Sementara itu, akuntansi perusahaan berorientasi pada maksimisasi laba dan peningkatan nilai pemegang saham. Laporan keuangan korporasi, seperti Laporan Laba Rugi, lebih menekankan profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan bisnis, yang menjadi indikator utama kinerja ekonomi entitas.

Perbedaan tujuan ini berimplikasi pada stakeholder utama yang dilayani. Pada sektor publik, laporan keuangan ditujukan bagi masyarakat umum, DPR/DPRD, lembaga pengawas seperti BPK, serta donor internasional. Transparansi menjadi kunci untuk memenuhi hak publik atas penggunaan pajak dan anggaran negara. Di sisi lain, perusahaan berfokus pada pemegang saham, kreditur, dan investor yang berkepentingan dengan profitabilitas dan kemampuan entitas dalam membayar utang. Regulator pasar modal seperti OJK juga menjadi pihak yang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap standar pelaporan. Kerangka hukum dan standar akuntansi juga membedakan kedua sektor tersebut. Pemerintah Indonesia mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) yang diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

²⁷ Salomi Jacomina Hehanussa, *Akuntansi Sektor Publik* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024).

Standar ini menekankan kepatuhan hukum dan akuntabilitas fiskal. Sementara perusahaan menggunakan SAK-ETAP untuk UMKM atau SAK-IFRS untuk perusahaan terbuka, yang diarahkan untuk memenuhi prinsip pasar dan kebutuhan investor global. Perbedaan kerangka ini tercermin dalam sistem anggaran: anggaran pemerintah bersifat mengikat secara hukum dan wajib dilaporkan dalam LRA, sedangkan anggaran perusahaan bersifat fleksibel dan berfungsi sebagai alat perencanaan internal tanpa kewajiban publikasi. Dari sisi basis pengukuran, sektor publik mengombinasikan basis kas (untuk realisasi anggaran) dan basis akrual (untuk aset dan kewajiban). Misalnya, pendapatan pajak diakui saat diterima secara fisik. Sebaliknya, perusahaan menggunakan basis akrual penuh untuk mencerminkan pendapatan dan beban secara tepat waktu, seperti mengakui pendapatan saat produk terjual meskipun pembayaran belum diterima. Selain itu, pemerintah menerapkan akuntansi dana terpisah untuk memastikan alokasi dana sesuai tujuan spesifik, seperti dana pendidikan atau bencana, sementara perusahaan mengelola seluruh aset sebagai satu kesatuan entitas bisnis.

Fungsi laporan keuangan juga berbeda secara signifikan. Pada sektor publik, laporan berperan sebagai alat prediksi dan perencanaan jangka panjang, seperti proyek infrastruktur 10 tahun, serta mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Kinerja diukur melalui output pelayanan publik, seperti jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun atau indeks kepuasan masyarakat. Sementara itu, laporan keuangan perusahaan berfokus pada evaluasi kinerja jangka pendek-menengah, seperti ROI (Return on Investment) dan market share, dengan indikator utama berupa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan. Aspek transparansi dan risiko turut membedakan kedua sektor. Pemerintah wajib mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka dan diaudit oleh BPK/BPKP dengan fokus pada pencegahan korupsi. Risiko yang dihadapi bersifat politis, seperti perubahan kebijakan atau tuntutan publik. Di perusahaan, transparansi terbatas pada pemangku kepentingan terkait, dengan audit eksternal yang menilai kewajaran laporan dan risiko material seperti fluktuasi pasar atau persaingan bisnis. Secara keseluruhan, akuntansi sektor publik dan perusahaan

merefleksikan paradigma yang berbeda: pemerintah berorientasi pada kepentingan kolektif dan kepatuhan hukum, sedangkan perusahaan mengejar efisiensi ekonomi dan keuntungan pemilik. Meski demikian, integritas data dan transparansi menjadi prinsip universal yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas di kedua sektor.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan didefinisikan sebagai penyajian terstruktur atas transaksi keuangan suatu entitas pelaporan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup catatan akuntansi yang disusun untuk memudahkan pengguna dalam memahami kinerja keuangan dan mengambil keputusan strategis terkait alokasi sumber daya. Dalam konteks pemerintah daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai prinsip SAP, meliputi proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Kelengkapan laporan keuangan diukur melalui komponen wajib seperti neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (CaLK) sebagai penjelasan integral.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

PP No. 71 Tahun 2010 menetapkan empat kriteria utama kualitas laporan keuangan pemerintah:

1. Relevan

Laporan harus memenuhi kebutuhan pengguna dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Relevansi dicapai melalui:

- Nilai Umpam Balik: Informasi yang memungkinkan evaluasi keputusan masa lalu.
- Nilai *Prediktif*: Dasar untuk memproyeksikan keputusan masa depan.

- Ketepatan Waktu: Penyajian sesuai jadwal untuk efisiensi pengambilan keputusan.
- Kelengkapan: Cakupan informasi utuh guna menghindari kesalahan interpretasi.

2. Andal (*Reliable*)

Informasi harus akurat, bebas dari kesalahan material, dan dapat diverifikasi. Kriteria keandalan meliputi:

- Penyajian Jujur: Mencerminkan fakta transaksi secara objektif.
- Dapat *Diverifikasi*: Konsistensi hasil pemeriksaan oleh berbagai pihak.
- *Netralitas*: Tidak berpihak pada kepentingan tertentu.

3. Dapat Dibandingkan (*Comparable*)

Laporan memungkinkan perbandingan antar periode atau antar entitas, asalkan menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten. Perubahan kebijakan harus diungkapkan pada periode terjadinya.

4. Dapat Dipahami (*Understandable*)

Informasi disajikan dengan bahasa, simbol, dan istilah yang jelas, meskipun pengguna diharapkan memiliki pengetahuan dasar tentang operasi entitas dan kemauan untuk mempelajari laporan.

Kualitas laporan keuangan yang baik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Q.S. An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
 وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَنِّيْا أَوْ فَقِيرِيْا فَاللَّهُ أَوْلَى بِحِكْمَةٍ فَلَا تَتَبَعَّعُوا الْهُوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوْا
 أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرِيْا ۝ ۱۳۵

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, kedua orang tuamu, atau kaum kerabatmu. Baik mereka kaya maupun miskin, Allah lebih baik melindungi mereka. Maka janganlah hawa nafsumu menyesatkan kamu dari keadilan. Jika kamu memutarbalikkan kesaksian atau enggan memberikannya, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan implementasi prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana diajarkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 135. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim wajib menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian yang benar, transparan, dan objektif dengan niat murni mencari ridha Allah SWT. Keadilan dan kejujuran tersebut harus diterapkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau jabatan - baik terhadap keluarga, orang kaya, orang miskin, pimpinan, maupun bawahan. Ayat ini juga memperingatkan agar tidak meninggalkan prinsip keadilan dan kejujuran hanya untuk memenuhi keinginan pribadi atau kelompok. Allah SWT memberikan peringatan bahwa manipulasi data atau memberikan kesaksian yang tidak sebenarnya akan mendapatkan balasan yang setimpal, karena Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia. Dengan demikian, menjaga kualitas dan integritas laporan keuangan bukan sekadar memenuhi tuntutan administratif atau hukum dunia, tetapi juga merupakan wujud keimanan dan ketaatan kepada Allah. Hal ini menjadi bentuk loyalitas terhadap prinsip keadilan dan akan menjadi bahan pertanggungjawaban, tidak hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Allah di akhirat kelak.

2.1.5 Budaya organisasi

Mengacu pada pandangan Rivai budaya organisasi dapat dipahami sebagai sebuah framework yang berfungsi sebagai panduan perilaku dan

pengambilan keputusan sehari-hari bagi karyawan, serta mengarahkan tindakan mereka dalam mencapai tujuan organisasiri²⁸. Dalam implementasinya, budaya organisasi diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik terhadap pengembangan pribadi anggota organisasi maupun terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil beragam terkait pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Andari dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh positif antara budaya organisasi dengan kualitas pelaporan keuangan²⁹. sementara menurut Ananda budaya yang lemah dapat memicu laporan yang tidak akurat dan berisiko melanggar hukum oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mananamkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam budaya kerja mereka, terutama di era globalisasi dan digitalisasi, di mana akurasi dan kecepatan penyampaian informasi keuangan menjadi semakin krusial dalam persaingan bisnis³⁰. Hal ini berimplikasi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, penguatan budaya organisasi yang berfokus pada nilai-nilai etika dan integritas tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga membangun kepercayaan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan di pasar global. Oleh karena itu, perusahaan perlu secara aktif mengembangkan dan memelihara budaya organisasi yang mendukung praktik pelaporan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.

Budaya organisasi yang kuat juga berfungsi sebagai landasan untuk inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam praktik pelaporan keuangan. Ketika karyawan merasa didorong untuk berbagi ide dan memberikan masukan tanpa

²⁸ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik* (Rajawali Pers, 2009).

²⁹ Desak Putu Tika Adi Andari, “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh” (UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR, 2022).

³⁰ Ananda, “Pengaruh Etika Bisnis Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan,” *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 2023.

rasa takut akan konsekuensi negatif, mereka lebih cenderung untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengusulkan solusi yang kreatif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan proaktif. Selain itu, budaya yang mendukung pembelajaran dan pengembangan profesional akan memastikan bahwa karyawan selalu diperbarui dengan praktik terbaik dan regulasi terbaru dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, perusahaan yang mengedepankan budaya organisasi yang positif tidak hanya akan mampu memenuhi tuntutan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, tetapi juga akan menciptakan tim yang lebih terampil dan berkomitmen, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang perusahaan.

Dalam konteks pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas pelaporan keuangan, terdapat dua indikator variabel utama yang perlu diperhatikan, yaitu hierarchy dan clan. Pertama, hierarchy merujuk pada struktur organisasi yang teratur dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta berjenjang. Budaya organisasi yang menekankan pada hierarchy cenderung memiliki prosedur dan aturan yang ketat, termasuk dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal dan akuntabilitas menjadi lebih terstruktur karena setiap level dalam organisasi memiliki peran dan batasan yang tegas. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan, karena setiap tahap harus melalui proses verifikasi dan persetujuan sesuai dengan hierarki yang berlaku. Namun, di sisi lain, budaya hierarchy yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi dan responsivitas terhadap perubahan, terutama dalam menghadapi dinamika bisnis yang cepat. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menyeimbangkan struktur hierarchy dengan fleksibilitas tertentu agar tetap mampu beradaptasi tanpa mengorbankan akurasi dan keandalan laporan keuangan. Kedua, clan menggambarkan budaya organisasi yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, serta komitmen bersama. Dalam budaya clan, hubungan interpersonal dan kerja sama tim sangat dihargai, sehingga anggota organisasi cenderung merasa lebih terlibat

dan bertanggung jawab terhadap tujuan bersama, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan. Budaya ini mendorong transparansi dan komunikasi terbuka, di mana karyawan tidak ragu untuk melaporkan kesalahan atau ketidaksesuaian tanpa takut akan sanksi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan karena masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih awal. Selain itu, budaya clan yang kuat juga memfasilitasi pembelajaran dan berbagi pengetahuan di antara anggota organisasi, sehingga kapasitas dan pemahaman mereka terhadap standar akuntansi dan regulasi keuangan terus berkembang. Namun, tantangan dari budaya clan adalah menjaga konsistensi dan disiplin dalam menerapkan prosedur, mengingat sifatnya yang lebih informal dibandingkan hierarchy.

Budaya organisasi yang berlandaskan integritas, akuntabilitas, dan keadilan sejalan dengan prinsip Islam tentang amanah (kepercayaan) dan qisth (keadilan). Nilai-nilai ini tercermin dalam Surah Al-Ma''idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الْلَّذِينَ إِيمَانُكُمْ نَوْعًا قَوْمٌ يَسْتَأْنِفُونَ شَهَادَةَ اللَّهِ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ عِبَادَهُ مَنْعَلُونَ ۖ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

QS. Al-Ma''idah: 8 menjadi landasan etis bagi pembentukan budaya organisasi yang adil dan bertanggung jawab. Nilai keadilan dan integritas dalam ayat ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa budaya organisasi yang kuat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, transparansi, dan daya saing perusahaan. Dengan mengintegrasikan prinsip "*berlaku adil karena Allah*", organisasi tidak hanya memenuhi tuntutan bisnis modern, tetapi juga mewujudkan ketaatan sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Budaya yang berakar pada nilai Qur'an akan melahirkan sistem pelaporan keuangan yang

kredibel, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keharmonisan antara kepentingan duniaawi dan tanggung jawab ukhrawi.

2.1.5 Kompetensi sumber daya manusia

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas, yang merujuk pada kemampuan individu, organisasi, atau sistem dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Kapasitas ini harus dipahami sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, serta untuk menghasilkan keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut³¹. Tanggung jawab dapat dilihat dari Kualitas laporan keuangan yang akuntabel sangat bergantung pada kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam penyusunannya, terutama dalam pemahaman dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kompetensi SDM mencerminkan kemampuan dalam menjalankan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan laporan keuangan merupakan faktor kunci terciptanya integritas keuangan. SDM yang berkualitas dan berpengalaman dapat memahami logika akuntansi dengan baik, sehingga dapat dihasilkan integritas keuangan³². Menurut beberapa ahli, kompetensi adalah ciri-ciri yang mendasari seseorang dalam mencapai kinerja tinggi di tempat kerja. Karyawan yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam bekerja, yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, waktu, dan tenaga. Surastiani dan hadayani menyoroti pentingnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) sebagai elemen

³¹ Dhedy Triwardana, Yusralaini Yusralaini, and Susilatri Susilatri, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)” (Riau University, 2017).

³² Kadek Desiana Wati et al., “Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah,” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha 2*, no. 1 (2014).

kunci dalam kualitas laporan keuangan daerah³³. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa SDM yang dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai mampu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga pengendalian keuangan.

Indikator operasional variabel pemahaman terhadap peraturan dan standar serta pendidikan dan pelatihan menjadi tolok ukur kritis dalam menilai kompetensi SDM pengelola keuangan. Pemahaman mendalam terhadap peraturan seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Undang-Undang Keuangan Negara, dan Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan fondasi untuk memastikan laporan keuangan disusun secara akurat dan sesuai prinsip *compliance*. Indikator ini dapat diukur melalui kemampuan SDM dalam mengaplikasikan regulasi tersebut pada siklus akuntansi, mulai dari pengakuan pendapatan hingga penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu, pendidikan dan pelatihan berperan sebagai mekanisme penguatan kapasitas, baik melalui program formal (seperti sertifikasi CGAO/*Certified Government Accounting Officer*) maupun pelatihan teknis berbasis kasus riil (misal: workshop penyusunan LKPD berbasis SAP). Kompetensi sumber daya manusia tidak hanya menjadi prasyarat teknis dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, tetapi juga mencerminkan nilai etika dan spiritual dalam menjalankan amanah. Al-Qur'an Surah Al-Qasas ayat 26 menegaskan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ أَسْتَعِرُهُ إِنَّ حَيْرَ مَنِ اسْتَجْرَتْ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjaanku dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

³³ Nurendah Ragillita Untary and Moh Didik Ardiyanto, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)” (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2015).

Ayat ini menekankan dua kriteria utama dalam memilih individu untuk mengemban tanggung jawab: kekuatan (kompetensi) dan amanah (integritas). Dalam konteks pengelolaan keuangan, "kekuatan" merujuk pada kemampuan teknis seperti penguasaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), analisis anggaran, dan penggunaan sistem informasi keuangan, sedangkan "amanah" mencakup kejujuran, transparansi, dan komitmen untuk menghindari penyimpangan. Penelitian Surastiani dan Hadayani sejalan dengan prinsip ini, di mana SDM yang kompeten dan berintegritas tidak hanya mampu menyusun laporan keuangan sesuai prosedur, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi mencerminkan prinsip *value for money* dan berorientasi pada kepentingan publik. Integrasi antara kompetensi dan nilai-nilai Quranis ini menjadi kunci dalam mengurangi risiko *moral hazard* dan *asimetri informasi*. Misalnya, SDM yang memahami SAP secara mendalam dapat menghindari kesalahan klasifikasi anggaran, sementara ketakwaan sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Allah mencegah praktik manipulasi data. Dalam praktiknya, pemerintah daerah yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK umumnya memiliki SDM yang tidak hanya terlatih secara teknis, tetapi juga berkomitmen pada prinsip *ikhlas* (keikhlasan) dan *istiqamah* (konsistensi) dalam bekerja. Dengan demikian, kompetensi SDM dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga transformatif—mengubah paradigma pelaporan keuangan dari sekadar kewajiban administratif menjadi bagian dari ibadah sosial (*hablum minannas*) yang berpahala.

2.1.6 Sistem informasi akuntansi

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem yang memasukkan, menyimpan dan mengelola data keuangan (finance), beserta akuntansi untuk digunakan oleh pengambil keputusan atau stakeholder bersangkutan³⁴. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem komputerisasi yang menerapkan

³⁴ Haria Saputri, Ujang Kusnaedi, and Yandi Asmana, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Di Jakarta Utara," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023): 102–9.

metode tertentu untuk memantau seluruh aktivitas akuntansi terkait dengan pemanfaatan sumber daya teknologi informasi. Sistem ini dibangun berdasarkan beberapa fondasi konseptual, meliputi konsep akuntansi, konsep sistem, dan konsep informasi. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dibangun atas dasar beberapa konsep utama, yaitu konsep akuntansi, konsep sistem, dan konsep informasi. Berdasarkan landasan tersebut, berikut penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing konsep:

a. Konsep Sistem

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart dalam buku *Accounting Information System* (yang telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia), sistem didefinisikan sebagai sekumpulan dua atau lebih komponen yang saling terhubung dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan³⁵. Sementara itu, Jogiyanto dalam bukunya Analisis dan Desain Sistem Informasi menyatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa subsistem atau elemen komputer yang bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu³⁶. Pada dasarnya, sistem dapat dipahami sebagai sekelompok komponen (seperti fungsi, manusia, aktivitas, dan lainnya) yang saling terkait dan mendukung satu sama lain untuk mewujudkan satu atau lebih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

b. Konsep Informasi

Informasi merupakan data yang sudah dimanifestasikan dalam bentuk tertentu, sehingga bagi yang memerlukannya merupakan sesuatu yang berguna, mempunyai atau diharapkan akan mempunyai nilai nyata sebagai sarana dalam proses pengolahan data menjadi informasi³⁷. Informasi pada hakikatnya bersumber dari data, dimana istilah 'data' sendiri merupakan bentuk jamak dari datum atau item data. Secara mendasar, data merepresentasikan fakta-fakta objektif yang mendeskripsikan suatu peristiwa atau entitas dalam dunia nyata.

³⁵ Marshall B Romney, "Dan Paul John Steinbart. 2015," *Accounting Information System*, n.d.

³⁶ Hartono M Jogiyanto, *Analisis Dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis)* (Penerbit Andi, 2017).

³⁷ Saputri, Kusnaedi, and Asmana, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Di Jakarta Utara."

Proses pengolahan data inilah yang kemudian melahirkan informasi. Para ahli memiliki berbagai perspektif dalam mendefinisikan informasi. Anthony dan Dearden melalui karya Jogiyanto memandang informasi sebagai hasil pengolahan data yang telah memiliki nilai tambah dan manfaat bagi penerimanya. Sementara itu, O'Brien menekankan bahwa informasi merupakan data yang telah diberi konteks sehingga menjadi bermakna bagi pengguna. Romney dan Steinbart pun menyatakan hal serupa dengan mendefinisikan informasi sebagai data yang telah melalui proses pengorganisasian dan pengolahan untuk memberikan pemahaman. Dari berbagai pendapat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa esensi informasi terletak pada transformasi data mentah menjadi sesuatu yang terorganisir, bernilai guna, dan bermakna bagi para penggunanya, sehingga kualitas suatu informasi sangat ditentukan oleh sejauh mana informasi tersebut mampu memberikan manfaat praktis bagi pemakainya.

C. Konsep sistem informasi

Menurut O'Brien, Sistem Informasi adalah gabungan yang terorganisir antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi³⁸. Sementara itu, Kenneth C. Laudon dan rekannya mendefinisikannya sebagai sekumpulan komponen yang saling terhubung untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan serta pengawasan di dalam organisasi. James A. Hall juga menyatakan bahwa Sistem Informasi merupakan serangkaian prosedur formal yang mengatur pengumpulan data, pengolahan menjadi informasi, serta pendistribusianya kepada pengguna. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi merupakan pengelolaan sumber daya manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak yang saling berinteraksi untuk mengubah data menjadi

³⁸ M. George O'brien, A. James., and Marakas, *Introduction to Information Systems. 16th Edition*, 2014.

informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Tujuannya adalah menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan operasional suatu perusahaan.

D. Konsep sistem informasi akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berfungsi untuk memproses data, khususnya data keuangan. Ruang lingkup SIA terbatas pada pengolahan informasi finansial, sehingga output yang dihasilkan pun berupa laporan keuangan. Menurut Romney & Paul, Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu susunan komponen yang saling terkait dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, meliputi manusia, prosedur, dan teknologi informasi³⁹. Sementara itu, Bodnar dan Hopwood mendefinisikan SIA sebagai Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi⁴⁰. Hasilnya kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan .Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu kerangka kerja yang mencakup formulir, catatan, prosedur, dan perangkat tertentu untuk mengelola data sekaligus menghasilkan laporan operasional dan keuangan suatu perusahaan.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) beroperasi melalui tiga variabel utama yang saling terkait, yaitu alat dan sumber daya manusia, jurnal catatan, serta laporan atau informasi. Pertama, alat dan sumber daya manusia menjadi fondasi operasional SIA, di mana perangkat keras seperti komputer dan server serta perangkat lunak akuntansi berkolaborasi dengan sumber daya manusia seperti akuntan, auditor, dan manajer keuangan untuk memastikan sistem berjalan efektif. Kedua, jurnal dan catatan berperan sebagai media pencatatan transaksi keuangan, mencakup jurnal umum untuk mencatat transaksi secara kronologis

³⁹ Marshall B Romney and Paul John Steinbart, "Sistem Informasi Akuntansi," *Jakarta: Salemba Empat* 3, no. 01 (2015).

⁴⁰ George H Bodnar and William S Hopwood, *Accounting Information Systems* (Pearson, 2013).

dan jurnal khusus seperti jurnal penjualan atau pembelian, yang kemudian diposting ke buku besar untuk pengelompokan data berdasarkan akun-akun tertentu. Ketiga, laporan atau informasi merupakan output akhir SIA yang mencakup laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, serta laporan khusus untuk analisis biaya atau kebutuhan regulator, di mana keakuratan dan ketepatan waktu informasi ini sangat krusial untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan demikian, ketiga variabel ini membentuk suatu siklus akuntansi yang terintegrasi, mulai dari pengumpulan data, pemrosesan, hingga penyajian informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam hal transparansi, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an, salah satunya QS. Al-Baqarah ayat 282, yang memerintahkan umat Islam untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara jelas dan adil.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَائِنْتُم بِدِينِنَ آلَّا أَجِلٌ مُسَمَّى فَاقْتُبُوْهُ ۖ وَلَيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَيُكْتَبَ ۝ وَلَيُعْلَمَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقْقُ بِالْعَدْلِ
وَلَيُبَيَّنَ اللَّهُ رَبُّهُ ۝ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۖ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya.

Ayat ini secara tegas menegaskan pentingnya pencatatan transaksi keuangan secara tertulis, jelas, dan adil sebagai bentuk pertanggungjawaban. Perintah untuk mendokumentasikan utang piutang dengan melibatkan penulis yang objektif mencerminkan prinsip transparansi (al-shidq) dan keadilan (al-'adl) dalam Islam, yang sejalan dengan fungsi utama Sistem Informasi Akuntansi

(SIA). Dalam praktik modern, SIA berperan sebagai "penulis" yang dimaksud dalam ayat ini, yakni sistem yang mencatat transaksi secara akurat tanpa manipulasi. Penekanan pada ketelitian ("jangan mengurangi sedikitpun") juga relevan dengan prinsip akurasi data dalam SIA, di mana setiap detail transaksi harus tercatat lengkap untuk mencegah kecurangan (*gharar*). Selain itu, seruan untuk bertakwa kepada Allah dalam ayat ini menggarisbawahi dimensi akuntabilitas moral (*mas'uliyyah*) yang melampaui sekadar pertanggungjawaban administratif. Dengan demikian, penerapan SIA dalam perspektif Islam tidak hanya memenuhi standar teknis akuntansi, tetapi juga bernilai ibadah ketika dijalankan dengan integritas dan kesadaran pengawasan ilahiah.

2.1.7 Sistem pengendalian internal

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau pengendalian intern merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi sumber daya organisasi. Dalam implementasinya, pengendalian intern mencakup berbagai kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tiga tujuan utama: pencapaian sasaran organisasi, penyediaan informasi keuangan yang dapat diandalkan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, sistem pengendalian intern dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

1. Pengendalian Intern Akuntansi - Dirancang untuk mengatasi masalah inefisiensi dengan fokus pada perlindungan aset organisasi dan memastikan akurasi data akuntansi. Salah satu penerapannya adalah dengan melakukan pemisahan fungsi dan tanggung jawab di antara unit-unit organisasi.
2. Pengendalian Administratif - Difokuskan pada peningkatan efisiensi operasional dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Contoh implementasinya adalah pelaksanaan audit laporan untuk mengidentifikasi penyimpangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan korektif.

Aktivitas ini diarahkan untuk membangun tingkat keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam beberapa dimensi: optimalisasi efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta pemenuhan aspek kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku⁴¹. Tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah memiliki keterkaitan erat dengan efektivitas sistem pengendalian yang diterapkan. Ketika sistem pengendalian tidak berjalan optimal, organisasi akan menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi potensi kecurangan dalam mekanisme akuntansi, yang selanjutnya dapat mengakibatkan menurunnya tingkat relevansi bukti audit dari dokumentasi akuntansi⁴². SPI mengintegrasikan serangkaian kebijakan dan prosedur yang diimplementasikan untuk menjamin tercapainya sasaran organisasi, memastikan tersedianya informasi keuangan yang kredibel, serta mendorong kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang berlaku⁴³. Konsekuensinya, penerapan SPI yang efektif memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan reliabilitas dan objektivitas informasi, yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi kualitas laporan keuangan secara komprehensif. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pengendalian internal di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP didefinisikan sebagai suatu proses berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Proses ini mencakup serangkaian tindakan dan aktivitas yang dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara,

⁴¹ James A Hall, *Accounting Information Systems* (Cengage Learning, 2011).

⁴² Lenny Possumah et al., *AUDITING AUDITING Editor: Siswadi Sululing*, 2024.

⁴³ Ulric J Gelinas, Richard B Dull, and Patrick Wheeler, *Accounting Information Systems* (Cengage AU, 2018).

serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, SPIP berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terstruktur untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pengendalian internal pemerintah menurut PP No.60 Tahun 2008 terdiri atas 5 komponen yang saling berkaitan, antara lain:⁴⁴

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah komponen utama yang membentuk karakter suatu organisasi dan memengaruhi kesadaran seluruh anggotanya. Komponen ini menjadi fondasi dalam menetapkan semua elemen pengendalian internal guna menciptakan struktur dan kedisiplinan dalam organisasi.

2. Penilaian Risiko

Proses ini melibatkan identifikasi dan analisis risiko potensial yang mungkin dihadapi entitas. Penilaian risiko sangat penting untuk menentukan langkah pengendalian agar risiko tersebut tidak mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal yang berdampak negatif terhadap proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan, hingga penyajian laporan keuangan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas ini mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa langkah pengendalian risiko dalam mencapai tujuan organisasi dilaksanakan secara efektif. Aktivitas pengendalian umumnya memiliki berbagai tujuan yang diterapkan di berbagai tingkatan fungsi organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Ini merujuk pada proses pengidentifikasi dan penyampaian informasi dalam format serta waktu yang tepat agar dapat dipahami oleh pihak terkait,

⁴⁴ Jan Hoesada, "Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan," *Jakarta: Salemba Empat* 238 (2016).

sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Sistem informasi dan komunikasi dianggap relevan jika mencakup pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individu dalam pengendalian internal terkait penyusunan laporan keuangan.

5. Pemantauan/Pengawasan

Proses ini melibatkan evaluasi berkala terhadap kinerja pengendalian internal, termasuk penentuan desain dan efektivitas pengendalian, serta penerapan tindakan korektif yang dinilai secara independen.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu mekanisme yang mencakup tiga indikator variabel kunci dalam pelaksanaannya. Pertama, pembagian tanggung jawab yang jelas menjadi dasar penting dalam menciptakan struktur organisasi yang efektif. Dengan mendefinisikan tugas dan wewenang secara tegas antara berbagai unit kerja, dapat dicegah terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun tanggung jawab. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duties*) memastikan tidak adanya konsentrasi kendali pada satu pihak, sehingga mampu meminimalisir potensi penyimpangan dan kesalahan dalam proses akuntansi. Kedua, penentuan kebijakan dan standar akuntansi yang komprehensif berfungsi sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan akuntansi keuangan pemerintah. Standar ini mencakup berbagai aspek penting mulai dari pengakuan pendapatan dan belanja, penilaian aset, hingga mekanisme pelaporan keuangan. Adanya kebijakan yang terstandarisasi memungkinkan terciptanya konsistensi dalam penyajian laporan keuangan, sekaligus menjamin pemenuhan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, implementasi kebijakan dan standar yang konsisten merupakan faktor penentu keberhasilan SPIP. Pelaksanaan ini memerlukan komitmen seluruh jajaran organisasi melalui pembinaan sumber daya manusia, pengawasan rutin, serta evaluasi berkala. Pemanfaatan teknologi informasi modern dalam sistem akuntansi pemerintah dapat meningkatkan akurasi data dan efisiensi proses. Didukung oleh kegiatan audit internal dan eksternal yang rutin dilaksanakan, implementasi kebijakan

dapat terus dipantau dan disempurnakan guna mencapai tujuan pengendalian internal yang optimal.

Pengendalian internal sebagai bentuk pengawasan dan bahan evaluasi telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang tercermin dalam Q.S Asy-Syura ayat 6:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهَ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۝ وَمَا آتَتْ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

Orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain-Nya, Allah mengawasi (perbuatan) mereka, sedangkan engkau (Nabi Muhammad) bukanlah penanggung jawab mereka.

Pengendalian administratif berperan penting dalam memastikan bahwa perencanaan organisasi berjalan sesuai tujuan, sekaligus mencegah kesalahan yang dapat menimbulkan dampak serius. Fokusnya adalah memantau aktivitas organisasi secara sistematis untuk mendeteksi penyimpangan, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan efektif dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengendalian ini juga didasari oleh kesadaran akan tanggung jawab sebagai hamba Allah, sesuai dengan firman-Nya: "Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanhah (yang dipikulnya) dan janjinya." (QS. Al-Mu'minun: 8). Selain itu, hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas sabda Rasulullah SAW: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari & Muslim). Dengan demikian, pengendalian administratif tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bernilai ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab sebagai pemimpin.

2.1.8 Standar akuntansi pemerintahan

Kewajiban penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, yang secara fundamental mereformasi peraturan sebelumnya, PP No. 24 Tahun 2005. Transformasi utama dari peraturan lama ke yang baru adalah pergeseran basis akuntansi dari "kas menuju akrual" menjadi "akrual penuh". Jika sebelumnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis kas sementara Neraca sudah akrual, kini seluruh transaksi diakui saat terjadi, bukan saat kas bergerak, sehingga

menyajikan gambaran hak dan kewajiban finansial pemerintah secara lebih komprehensif. Perubahan basis ini juga berdampak pada penambahan komponen laporan keuangan yang wajib disajikan. Selain LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas, kini pemerintah juga harus menyusun Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Kehadiran Laporan Operasional menjadi sangat penting karena mampu menyajikan kinerja riil entitas dengan memperhitungkan seluruh beban, termasuk yang bersifat non-kas seperti penyusutan, yang informasinya krusial bagi manajemen untuk mengevaluasi efisiensi program dan biaya layanan.

Untuk memastikan penerapan SAP berjalan efektif, ada beberapa indikator variabel yang dapat digunakan. Kesesuaian sistem dengan SAP menjadi tolok ukur pertama, di mana sistem informasi akuntansi yang digunakan harus mampu mengintegrasikan modul, mendukung fungsionalitas akrual penuh, menghasilkan seluruh laporan keuangan yang diwajibkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 secara akurat dan tepat waktu, serta memiliki validasi dan kontrol internal yang memadai. Selanjutnya, pengidentifikasi transaksi mengevaluasi kemampuan entitas dalam mengidentifikasi secara tepat seluruh transaksi keuangan yang terjadi, baik kas maupun non-kas, sesuai prinsip akuntansi akrual, termasuk pemahaman personel akuntansi terhadap definisi dan kriteria pengakuan setiap transaksi. Ketiga, bukti di setiap transaksi menekankan pentingnya ketersediaan dan kualitas bukti pendukung untuk setiap transaksi yang dicatat, meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian bukti dengan transaksi, otorisasi yang memadai, dan sistem penyimpanan arsip yang baik. Terakhir, pengklasifikasian transaksi mengukur kemampuan entitas dalam mengklasifikasikan setiap transaksi ke dalam akun yang tepat sesuai bagan akun standar SAP, memastikan akurasi dan konsistensi dalam penggunaan bagan akun, serta pemahaman personel terhadap karakteristik dan dampak setiap jenis akun terhadap laporan keuangan. Dengan memantau indikator-indikator ini, pemerintah dapat mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan

implementasi SAP berjalan optimal demi tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

Pada intinya, penerapan SAP bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat dan dapat diperbandingkan, baik antar periode, antar entitas, maupun dengan anggaran. Meskipun implementasi SAP berbasis akrual ini menghadirkan tantangan seperti kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemutakhiran sistem informasi, langkah ini merupakan upaya strategis untuk menyelaraskan praktik akuntansi sektor publik Indonesia dengan standar internasional demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Prinsip-prinsip fundamental dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga sangat selaras dengan konsep inti kepemimpinan dan pengelolaan dalam Islam, yaitu amanah (kepercayaan) dan 'adl (keadilan), yang dijelaskan secara gamblang dalam Surah An-Nisa, Ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تُحِكُّمُوا

بِالْعُدْلِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.

Surah An-Nisa, Ayat 58 menegaskan dua prinsip fundamental yang sangat selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): amanah (kepercayaan) dan 'adl (keadilan). Amanah berarti para pengelola keuangan negara memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola dan melaporkan keuangan publik dengan jujur dan benar, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan rakyat. Sementara itu, 'adl berarti pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang objektif, tidak memihak, dan

merefleksikan kondisi keuangan yang sebenarnya, selaras dengan prinsip objektivitas dan keandalan dalam akuntansi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Peneliti	Metodologi dan variabel	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok) (Nurillah, 2014) ⁴⁵	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia(X1), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah(X2), pemanfaatan teknologi informasi(X3), dan sistem pengendalian intern(X4) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian adalah pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok, dengan sampel diambil	- kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, - penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, - pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, - system pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

⁴⁵ Nurillah and Muid, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)."

		melalui teknik purposive sampling. Analisis data mencakup uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, serta analisis regresi linier berganda.	
2	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara) (Sulaiman, 2022) ⁴⁶	Metodologi penelitian ini melibatkan karyawan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara sebagai populasi, dengan sampel 100 responden dari 35 OPD yang diambil menggunakan metode proportional stratified random sampling. Penelitian bersifat kuantitatif, menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda untuk menghubungkan kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia (X1), sistem teknologi informasi (X2),	<ul style="list-style-type: none"> - kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, - penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, - pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, - sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

⁴⁶ Sulaiman and Nurharjanti, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara)."

		sistem pengendalian intern (X3), dan standar akuntansi pemerintahan (X4).	
3	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Opd Kota Malang) (Yanti, made, Wahyu, 2020) ⁴⁷	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah(X1), pemanfaatan sistem informasi akuntansi(X2), dan pengawasan keuangan(X3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian terdiri dari pejabat dan staf keuangan di 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang, dengan 71 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 22.	<ul style="list-style-type: none"> - Standar akuntansi pememerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, - Pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, - Sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan,
4	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi	Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan responden dari pegawai SKPD Kabupaten Kampar	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, - penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

⁴⁷ Yanti et al., “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>.

	Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar) (Triwardana, 2017) ⁴⁸	yang terlibat dalam fungsi akuntansi, termasuk Kepala Dinas, Kasubag Keuangan, dan Bendahara, dengan total 78 responden. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif, validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Analisis regresi linear berganda diterapkan untuk mengukur pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah(X1), sistem akuntansi keuangan daerah(X2), dan kompetensi sumber daya manusia(X3) terhadap kualitas laporan keuangan	- Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, - Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
5	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi DIY dengan responden dari pegawai Bagian Keuangan di 15 Dinas. Waktu penelitian berlangsung pada April 2017,	- Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, - penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan,

⁴⁸ Triwardana, "KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)," *JOM Fekon* 4, no. 1 (2017): 641–55.

	Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. (Putriasi Pujanira, 2017) ⁴⁹	menggunakan desain kausal komparatif dan metode survei untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada 120 responden, dengan instrumen menggunakan skala Likert. Analisis data mencakup analisis deskriptif, uji asumsi klasik, serta analisis regresi sederhana dan berganda untuk menguji hipotesis. Hasil menunjukkan pengaruh positif dari Kompetensi Sumber Daya Manusia(X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan(X2), dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah(X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	- Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
6	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan	- Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

⁴⁹ Pujanira, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy," *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 6, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>.

	<p>Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi (Dinda Dwi Kansah, Tri Hesti Utamingtyas, Achmad Fauzi)⁵⁰</p>	<p>sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian adalah 62 responden pegawai di bagian Subbagian Keuangan/Akuntansi pada OPD Kota Bekasi dengan metode purposive sampling. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah <i>moderated regression analysis</i> (MRA) pada tingkat signifikansi 5% berbantuan software SPSS versi 26. Variabel independen adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern, variabel dependen adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan variabel moderasi adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi.</p>	<p>- Sistem pengendalian intern berpengaruh negative dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
--	--	--	---

⁵⁰ Dinda Dwi Kansah, Tri Hesti Utamingtyas, and Achmad Fauzi, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (2023): 405–19.

7	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Mokoginta, Lambey, Pontoh, 2017) ⁵¹	Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dengan SPSS 22. Data dikumpulkan dengan menyebarluaskan kuesioner kepada responden yang bersangkutan secara langsung. Sampel dalam penelitian ini adalah staf/pegawai bagian keuangan sebanyak 30 responden. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Variabel yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Intern (X1) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) sebagai variabel independen, dan kualitas laporan keuangan pemerintah (Y) sebagai variabel dependen.	<p>- Pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p> <p>- Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
8	Pengaruh Teknologi Informasi, Budaya Organisasi dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi(X1), budaya organisasi(X2), dan sistem informasi akuntansi(X3)	<p>- peran teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah</p> <p>- budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan,</p>

⁵¹ Novtania Mokoginta, Linda Lambey, and Winston Pontoh, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah," *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2017).

	Kasus PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang) (Inwanda, Mawardi, Sari, 2024) ⁵²	terhadap kualitas laporan keuangan di PT. BPR Artha Kanjuruhan, Pemkab Malang. Lokasi penelitian berada di Singosari, Kabupaten Malang. Sampel diambil dari 35 karyawan menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria tertentu. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert 1 hingga 5. Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda.	- sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
9	Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Indrasari dan Ismunawan, 2022) ⁵³	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, melibatkan 42 karyawan dari divisi keuangan PT Solo Murni sebagai sampel. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berisi 24 pertanyaan yang diukur dengan skala Likert lima poin, mencakup variabel budaya organisasi(X1),	- Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah - Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, - Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

⁵² Dani Inwanda, M Cholid Mawardi, and Arista Fauzi Kartika Sari, "Pengaruh Teknologi Informasi, Budaya Organisasi Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang)," *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 13, no. 02 (2024): 759–67.

⁵³ Indrasari dan Ismunawan, "Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2022): 27–38, <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i1.732>.

		<p>sistem pengendalian internal(X2), teknologi informasi(X3), dan kualitas laporan keuangan. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan IBM SPSS Statistic 19, setelah melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil analisis diharapkan memberikan wawasan tentang pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan.</p>	
10	Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan	<p>penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei Populasi penelitian mencakup seluruh LPD di daerah tersebut, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Variabel yang diteliti terdiri dari etika kepemimpinan(X1), kualitas sistem informasi akuntansi(X2), fungsi badan pengawas(X3),</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah - Etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, - Fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. - Tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

	Blahbatuh (Andari 2022) ⁵⁴	tingkat pemahaman akuntansi(X4), dan budaya organisasi(X5) sebagai variabel independen, serta kualitas pelaporan keuangan(Y) sebagai variabel dependen.	- Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
--	--	---	---

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara)". Terdapat kontradiksi dalam temuan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Budaya organisasi sebagai variabel baru menunjukkan potensi untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan, namun belum banyak diteliti dalam konteks pemerintahan daerah. Gap penelitian ini mencakup variabel yang belum dieksplorasi secara mendalam, seperti budaya organisasi dan pengaruh sistem pengendalian intern serta teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi dan menguji kembali pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Signifikansi penelitian diharapkan memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di sektor publik, serta menjadi referensi bagi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

⁵⁴ Andari, ‘Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh.’

2.3 Rumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas laporan keuangan

Budaya organisasi merupakan faktor kunci yang secara fundamental memengaruhi kinerja dan keberhasilan suatu entitas bisnis, terutama dalam konteks produksi laporan keuangan berkualitas tinggi⁵⁵. Sebagai kerangka kompleks yang terdiri dari sistem keyakinan, praktik, dan pola interaksi yang terinternalisasi oleh seluruh anggota organisasi, budaya organisasi bertindak sebagai mekanisme intrinsik yang membentuk dan mengarahkan perilaku, sikap, dan pendekatan profesional para pelaku di dalamnya. Lebih dari sekadar seperangkat aturan tertulis, budaya organisasi mengintegrasikan nilai-nilai etis, integritas, dan akuntabilitas ke dalam setiap aspek proses bisnis, yang pada gilirannya secara signifikan memengaruhi kualitas, kehandalan, dan transparansi informasi finansial yang dihasilkan oleh perusahaan. Budaya organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti sifat, sikap, dan karakter seseorang. Artinya, semakin baik budaya organisasi dalam sebuah perusahaan maka akan berdampak baik terhadap kualitas laporan keuangan. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, didukung oleh penelitian Rahman⁵⁶ dan Setyowati⁵⁷ yang menunjukkan hubungan signifikan antara budaya organisasi dan kualitas laporan keuangan.

Dalam konteks teori agensi, di mana terdapat potensi divergensi kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen), budaya organisasi yang kuat dan positif memainkan peran signifikan. Teori agensi mengakui bahwa agen mungkin tidak selalu bertindak sepenuhnya demi kepentingan prinsipal, sehingga memerlukan mekanisme untuk menyelaraskan perilaku tersebut. Budaya organisasi, dalam hal ini, berfungsi sebagai mekanisme pengendalian informal (soft control) yang efektif. Budaya yang menanamkan

⁵⁵ Dewi Yesiana Rahman, Erlin Rohmawati, Ninis Sriyani, "PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN."

⁵⁶ Dewi Yesiana Rahman, Erlin Rohmawati, Ninis Sriyani.

⁵⁷ Setyowati et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 20, no. 2 (2016): 179–91,
<https://media.neliti.com/media/publications/144499-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas.pdf>.

nilai-nilai luhur seperti integritas, akuntabilitas, dan transparansi dapat menyelaraskan kepentingan agen dengan prinsipal. Agen yang telah menginternalisasi nilai-nilai ini akan cenderung termotivasi secara intrinsik untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan andal, karena hal tersebut sejalan dengan norma dan ekspektasi organisasi. Ini secara efektif dapat mengurangi risiko *moral hazard*, di mana agen mungkin tergoda untuk bertindak oportunistik atau menyembunyikan informasi. Lebih lanjut, budaya organisasi yang positif memperkuat komitmen manajer terhadap tujuan perusahaan secara keseluruhan dan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka atas kualitas pelaporan keuangan. Lingkungan yang didasari etika dan profesionalisme tinggi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak hanya akurat tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, budaya organisasi tidak hanya mendorong perilaku etis, tetapi juga berfungsi sebagai lapisan pengawasan internal yang mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan, sekaligus berpotensi mengurangi *agency costs* terkait pengawasan yang intensif.

H1: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.3.2 Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset fundamental dalam sebuah organisasi, yang tidak sekadar dipandang sebagai tenaga kerja, melainkan modal intelektual bernilai strategis⁵⁸. Modal manusia mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas individual yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan layanan profesional dan kontribusi ekonomis. Penelitian empiris tentang kualitas SDM di berbagai instansi pemerintahan menunjukkan kondisi yang beragam. Studi Indrisari dan Nahartyo di Palembang

⁵⁸ Setiawan, “Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang,” *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan* 1, no. 1 (2016): 24, <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301>.

dan Ogan Ilir mengungkapkan keterbatasan signifikan dalam sumber daya manusia pada sub bagian akuntansi, ditandai dengan minimnya jumlah pegawai dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan⁵⁹. Kondisi serupa juga teridentifikasi oleh Tantri di Semarang, di mana kompetensi SDM belum memadai, terbukti dari rendahnya kualitas laporan keuangan yang dilaporkan Koran Tempo⁶⁰. Namun, temuan berbeda ditunjukkan Roviyantie pada penelitian di Pemerintah Daerah Tasikmalaya, yang menggambarkan SDM dengan kompetensi memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualifikasi⁶¹. Perbedaan ini menunjukkan variasi signifikan dalam kapabilitas sumber daya manusia antarwilayah. Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini bermaksud menguji korelasi antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian Nurillah⁶² dan Pujanira⁶³ yang menunjukkan hubungan signifikan antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan.

Dalam konteks ini, teori agensi memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teori agensi mengidentifikasi hubungan kontraktual antara prinsipal (dalam hal ini adalah masyarakat, DPRD sebagai wakil rakyat, dan pemerintah yang lebih tinggi) yang mendelagasikan tanggung jawab pengelolaan keuangan kepada agen (pemerintah daerah,

⁵⁹ Indrisari & Nahartyo, “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah,” *Jurnal SNA. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang*, 2008.

⁶⁰ Tantri, “Evaluasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Instansi Pemerintahan: Studi Kasus Di Kabupaten Dan Kota Semarang.,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2012.

⁶¹ Roviyantie, “Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya,” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 78-90., 2011.

⁶² Nurillah and Muid, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok).”

⁶³ Pujanira, ‘‘Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.’’

khususnya aparat pengelola keuangan). Masalah keagenan dapat timbul karena adanya asimetri informasi, di mana agen memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik mengenai kondisi keuangan dan operasional entitas dibandingkan prinsipal. Selain itu, terdapat potensi konflik kepentingan, di mana agen mungkin tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Dengan demikian, kompetensi SDM secara langsung mengurangi asimetri informasi dengan menyediakan laporan keuangan berkualitas tinggi kepada prinsipal. Hal ini memungkinkan prinsipal untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kinerja agen dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kualitas laporan yang baik, yang didukung oleh SDM kompeten, juga dapat mengurangi *agency costs*, seperti biaya untuk memverifikasi informasi atau kerugian akibat keputusan yang salah karena informasi yang tidak memadai. Manajer (agen) yang kompeten cenderung menghasilkan laporan yang lebih transparan, sehingga mempermudah prinsipal dalam menilai apakah agen telah bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan dan mengelola sumber daya secara efisien dan efektif.

H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.3.3 Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang terdiri dari sumber daya manusia, prosedur, data, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi informasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, memproses, mengambil, dan melaporkan data keuangan suatu organisasi⁶⁴. SIA yang efektif dan efisien memainkan peran vital dalam menghasilkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yang merupakan dasar dari laporan keuangan berkualitas. Kualitas SIA secara langsung memengaruhi kemampuan organisasi untuk mencatat transaksi secara akurat,

⁶⁴ Marshall Romney et al., *Accounting Information Systems Australasian Edition* (Pearson Higher Education AU, 2012).

memproses data dengan benar, dan menyajikan informasi keuangan secara tepat waktu dan dalam format yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan SIA yang baik, jejak audit (audit trail) menjadi jelas, pengendalian internal dapat diintegrasikan, dan integritas data dapat dijaga, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Inwanda, Mawardi, dan Sari⁶⁵ serta Andari⁶⁶ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara efektivitas sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam konteks teori agensi, hubungan antara prinsipal (pemilik atau pemangku kepentingan) dan agen (manajemen) sangat dipengaruhi oleh aliran informasi. Teori agensi mengasumsikan adanya potensi asimetri informasi, di mana agen memiliki akses ke informasi yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan prinsipal. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang efektif berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mengurangi asimetri informasi ini. Dengan SIA yang canggih dan terintegrasi, data keuangan dapat diproses secara akurat, cepat, dan transparan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan informatif bagi prinsipal. Lebih lanjut, SIA yang baik seringkali dilengkapi dengan pengendalian internal yang tertanam dalam sistem (embedded internal controls), seperti otorisasi otomatis, validasi data input, dan jejak audit yang komprehensif. Fitur-fitur ini membatasi ruang bagi agen untuk melakukan tindakan oportunistik atau menyembunyikan informasi yang relevan bagi prinsipal. Dengan demikian, SIA yang berkualitas tinggi membantu memastikan bahwa agen menyajikan informasi keuangan yang mencerminkan kondisi ekonomi entitas secara jujur, sehingga meningkatkan akuntabilitas agen kepada prinsipal. Hal ini memungkinkan prinsipal untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih kredibel,

⁶⁵ Inwanda et al., “Pengaruh Teknologi Informasi, Budaya Organisasi Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang)” 13, no. 02 (2016): 1–23.

⁶⁶ Andari, “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh.”

yang pada akhirnya dapat menyelaraskan kepentingan agen dengan prinsipal dan mengurangi *agency costs*.

H3: Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.3.4 Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

sistem pengendalian intern dapat didefinisikan secara singkat sebagai serangkaian kebijakan dan prosedur sistematis yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai kepada manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasional. Modo menegaskan bahwa kualitas pengendalian intern memiliki korelasi positif dengan kualitas informasi laporan keuangan⁶⁷. Semakin baik sistem pengendalian yang diterapkan, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Komponen utama sistem pengendalian intern menurut kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) terdiri dari lima elemen penting, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Setiap komponen memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan pengendalian menciptakan budaya organisasi yang mendukung praktik pengendalian, sementara penilaian risiko membantu mengidentifikasi potensi ancaman yang mungkin menghambat pencapaian sasaran. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian Indrasari dan Ismunawan⁶⁸ dan Modo⁶⁹ yang menunjukkan hubungan signifikan antara sistem pengendalian intern dan

⁶⁷ Modo, Saerang, and Poputra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud).”

⁶⁸ Indrasari dan Ismunawan, “Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.”

⁶⁹ Modo, Saerang, and Poputra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud).”

kualitas laporan keuangan. Dalam konteks teori agensi, hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) menjadi sangat relevan.

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, di mana manajer mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern yang efektif berfungsi sebagai alat krusial bagi prinsipal untuk mengawasi dan mengarahkan tindakan agen, serta memitigasi risiko yang timbul dari asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan. Secara lebih spesifik, komponen-komponen SPI seperti lingkungan pengendalian yang kuat menanamkan budaya integritas, aktivitas pengendalian (misalnya, otorisasi transaksi, rekonsiliasi, dan pemisahan tugas) membatasi peluang agen untuk bertindak oportunistik atau melakukan kesalahan dalam pelaporan, dan pemantauan yang efektif memastikan bahwa sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, SPI yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik akan meningkatkan kemungkinan bahwa agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dalam menyajikan laporan keuangan yang andal dan akurat. Dengan adanya pengendalian yang baik, prinsipal memperoleh keyakinan yang lebih besar bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi ekonomi dan kinerja organisasi yang sebenarnya, bebas dari salah saji material baik karena kecurangan maupun kesalahan. Ini secara langsung meningkatkan kredibilitas dan kualitas informasi yang disajikan, serta dapat mengurangi *agency costs* yang mungkin timbul.

H4: *Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan*

2.3.5 Pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses komprehensif yang mencakup serangkaian prinsip fundamental untuk mengoptimalkan pengurusan dan pengaturan sumber daya keuangan pemerintahan lokal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terdapat

sepuluh prinsip utama yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi: (1) tertib administrasi dan prosedural, (2) kepatuhan terhadap regulasi, (3) efektivitas pencapaian target, (4) efisiensi penggunaan sumber daya, (5) kehematan dalam pengadaan, (6) transparansi informasi, (7) akuntabilitas pertanggungjawaban, (8) keadilan distribusi, (9) proporsionalitas tindakan, dan (10) orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difungsikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks otonomi daerah yang luas, nyata, dan akuntabel. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian Yanti⁷⁰ dan Triwardana⁷¹ yang menunjukkan hubungan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan.

Dalam konteks ini, teori agensi dapat diterapkan untuk memahami hubungan antara para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya (prinsipal) atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang diimplementasikan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang efektif, memainkan peran krusial dalam mitigasi masalah keagenan. Pertama, SAP secara signifikan mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Dengan menyediakan kerangka kerja, definisi, kriteria pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang seragam, SAP memastikan bahwa laporan keuangan disajikan dalam 'bahasa' yang konsisten dan dapat dipahami oleh prinsipal. Hal ini meningkatkan keterbandingan (comparability) laporan keuangan antar periode dan antar entitas pemerintah daerah, memungkinkan prinsipal untuk melakukan evaluasi kinerja agen secara lebih informatif. Kedua, SAP berfungsi untuk membatasi perilaku

⁷⁰ Yanti et al., "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah."

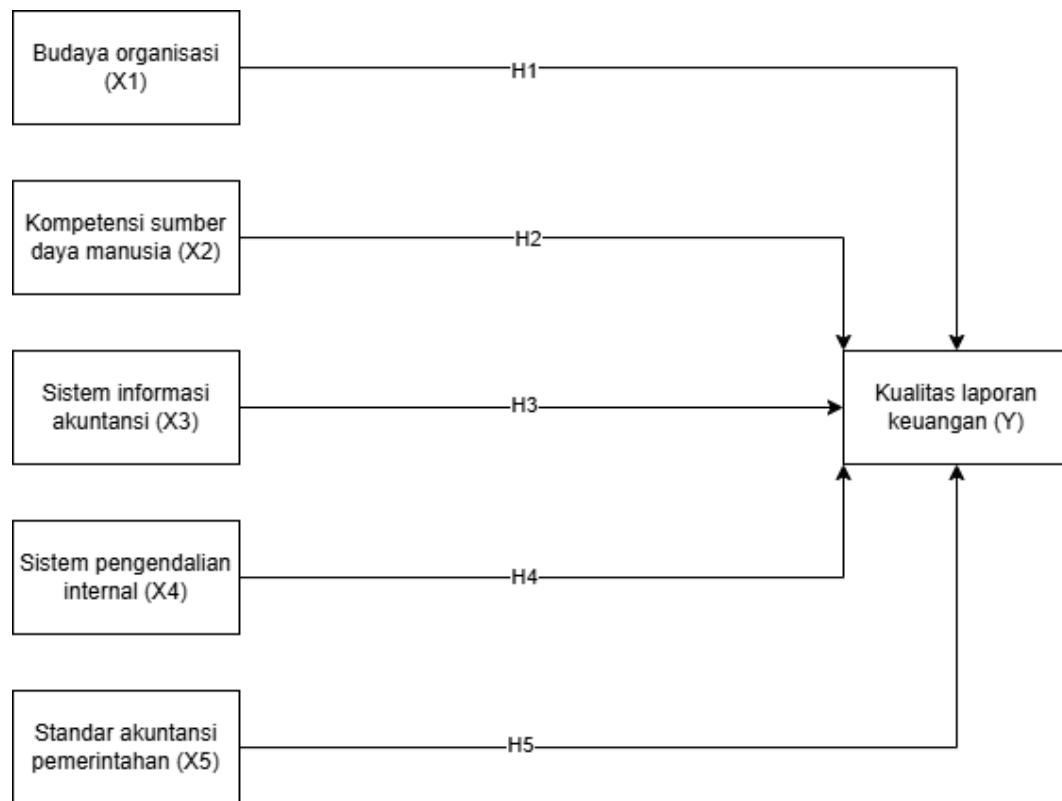
⁷¹ Triwardana, "KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)."

oportunistik agen (moral hazard). Dengan menetapkan aturan yang jelas dan mengurangi diskresi manajerial dalam pemilihan metode akuntansi, SAP mempersempit ruang bagi agen untuk memanipulasi data keuangan demi kepentingan pribadi atau untuk menutupi kinerja yang buruk. Kepatuhan terhadap SAP, yang ditegakkan melalui SAKD, mendorong terciptanya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah seperti tertib administrasi, kepatuhan regulasi, transparansi, dan akuntabilitas yang disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, penerapan SAP melalui SAKD yang baik meningkatkan akuntabilitas agen kepada prinsipal. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan sesuai standar memberikan dasar yang lebih andal bagi prinsipal untuk mengawasi tindakan agen, menilai pertanggungjawaban, dan membuat keputusan. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

H5: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka berpikir



BAB III

Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis berbasis angka dan sistem numerik. Kuantitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji teori dengan cara meneliti hubungan antar variabel⁷². Teknik pengambilan sampel acak biasanya digunakan, dan pengumpulan data melibatkan penggunaan instrumen penelitian⁷³. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, baik melalui interaksi langsung maupun dari objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen ilmiah, literatur, dan sumber lainnya⁷⁴. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri dari pejabat struktural yang menjalankan tugas dan fungsi akuntansi di organisasi pemerintah daerah Kabupaten Jepara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel yang dipublikasikan di situs resmi pemerintah daerah serta literatur yang relevan dengan topik yang diangkat oleh penulis.

3.2 Populasi Penelitian

Populasi Populasi adalah kumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan⁷⁵. Syahrani et al., (2014)

⁷² Yulia Widi Astuti, Ratno Agriyanto, and Ahmad Turmudzi, “Pengaruh Kualitas Layanan, Nilai Nasabah, Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna Layanan Mobile Banking Syariah,” *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia (Indonesian Journal of Marketing Science)* 19, no. 3 (n.d.): 134–58.

⁷³ Ari Kristin Prasetyoningrum, Kartika Marella Vanni, and Anjar Mustika, “Dividend Policy as an Intervening Variable between Return on Asset and Earning per Share on Stock Prices,” *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 6, no. 2 (2024): 268–71.

⁷⁴ Syofian Siregar, “Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & Spss,” 2015.

⁷⁵ Enni Pudjiastuti and Untung Sriwidodo, “Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja SMP Negeri 1 Purwodadi Grobogan,” *Jurnal Sumber Daya Manusia* 5, no. 2 (2011): 120–31.

Menurut populasi adalah keseluruhan subjek penelitian⁷⁶. Seluruh OPD yang ada di kabupaten jepara.

Tabel 3. 1 Populasi Penelitian

NO	NAMA OPD
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	DINAS PERHUBUNGAN
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA
	DAN TRANSMIGRASI
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
18	DINAS PERIKANAN
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
20	SEKRETARIAT DAERAH
21	SEKRETARIAT DPRD
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
	DAN PENGEMBANGAN DAERAH
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

⁷⁶ Abdul Wahab Syahrani, M Ma'ruf Abdullah, and Rahmi Widyanti, "Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan," *Al-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN* 1, no. 1 (2014): 17–33.

24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
25	INSPEKTORAT
26	KECAMATAN KEDUNG
27	KECAMATAN PECANGAAN
28	KECAMATAN KALINYAMATAN
29	KECAMATAN WELAHAN
30	KECAMATAN MAYONG
31	KECAMATAN NALUMSARI
32	KECAMATAN BATEALIT
33	KECAMATAN TAHUNAN
34	KECAMATAN JEPARA
35	KECAMATAN MLONGGO
36	KECAMATAN PAKISAJI
37	KECAMATAN BANGSRI
38	KECAMATAN KEMBANG
39	KECAMATAN KELING
40	KECAMATAN DONOROJO
41	KECAMATAN KARIMUNJAWA
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.3 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi⁷⁷. Penelitian ini menerapkan teknik pengambilan menggunakan *purposive sampling*. Dengan kriteria yang ditetapkan yaitu:

1. Aparatur Akuntansi: Responden adalah individu yang menjabat secara fungsional atau struktural di Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten Jepara dengan tugas dan tanggung jawab utama yang berkaitan langsung dengan fungsi-fungsi akuntansi, seperti penyusunan laporan keuangan, pengelolaan sistem informasi akuntansi, atau analisis data keuangan. Kriteria ini memastikan bahwa responden memiliki keahlian dan keterlibatan langsung dengan topik yang diteliti.

⁷⁷ Nidia Suriani and M Syahran Jailani, “Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan,” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 24–36.

2. Pengalaman Kerja Minimal 1 Tahun: Responden memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi pada Organisasi Pemerintah Kabupaten Jepara dilakukan minimal selama 1 (satu) tahun. Kriteria ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa dalam kurun waktu tersebut, responden dianggap telah memiliki pemahaman kontekstual dan pengalaman praktis yang memadai terkait tugas dan lingkungan kerjanya, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dan relevan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode riset yang memerlukan interaksi langsung dengan responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Penggunaan angket atau kuesioner memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan memahami sikap, perilaku, serta karakter responden yang dapat dipengaruhi oleh kondisi atau sistem yang ada. Kuesioner dibagi menjadi dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Pada kuesioner terbuka, responden diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka, sedangkan pada kuesioner tertutup, responden hanya perlu memilih jawaban dari opsi yang disediakan oleh peneliti⁷⁸.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam upaya untuk membuatnya lebih mudah dimengerti, peneliti akan menjelaskan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memperkirakan, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari responden dengan menggunakan pola ukur yang konsisten⁷⁹. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner, yang memerlukan parameter untuk menentukan satuan data, jenis data, dan tingkatan data yang akan diperoleh. Untuk mengukur variabel independen, yaitu Pengaruh Budaya Organisasi (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia

⁷⁸ Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & Spss."

⁷⁹ Siregar.

(X2), Sistem Informasi Akuntansi (X3), Sistem Pengendalian Internal (X4) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (X5). Serta variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan (Y), digunakan kuesioner yang diukur dengan skala *Likert*. Skala *Likert* adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pendapat, sikap, dan tanggapan individu terhadap suatu fenomena tertentu⁸⁰. Skala ini memiliki rentang nilai dari satu hingga lima, dengan klasifikasi sebagai berikut: nilai satu untuk kategori Sangat Tidak Setuju (STS), nilai dua untuk Tidak Setuju (TS), nilai tiga untuk Netral (N), nilai empat untuk Setuju (S), dan nilai lima untuk Sangat Setuju (SS).

Pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan memetakan operasional variabel, yang bertujuan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti ke dalam indikator penelitian. Penelitian ini memiliki lima variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sitem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi Dan Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan. Berikut adalah penjelasan mengenai definisi operasional variabel yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Dependental (Y) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas laporan keuangan dipahami sebagai nilai dari hasil penyusunan laporan keuangan. Karakteristik kualitatif kualitas laporan keuangan diantaranya relevan, andal,	1. Relevan. 2. Andal. 3. Dapat dibandingkan. 4. Dapat dipahami. ⁸¹	Skala Likert

⁸⁰ Siregar.

⁸¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan

	dapat dibandingkan dan dapat dipahami.		
Budaya Organisasi (X1)	Budaya organisasi adalah sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut bersama dalam organisasi yang mempengaruhi perilaku dan kinerja.	1. Hierarchy 2. Clan ⁸²	Skala Likert
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki oleh individu dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.	1. Pemahaman terhadap peraturan dan standar. 2. Pendidikan dan pelatihan. ⁸³	Skala Likert
Sistem Informasi Akuntansi(X3)	Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan serta	1. Alat dan sumber daya manusia 2. Jurnal catatan 3. laporan atau informasi ⁸⁴	Skala Likert

⁸² Vincentius David Djuanda, “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Perilaku Manajer Atas Isu Manajemen Lingkungan Sebagai Variabel Interveningnya” (Petra Christian University, 2016).

⁸³ Untary and Ardiyanto, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang).”

⁸⁴ Frista Chairina and Tineke Wehartaty, “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKPD Kota Surabaya,” *Jurnal Akuntansi Kontemporer* 11, no. 1 (2019): 31–39.

	akuntansi guna mendukung pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.		
Sistem Pengendalian Intern (X4)	Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme berkelanjutan yang dijalankan oleh manajemen dan seluruh staf untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Proses ini mencakup efektivitas operasional, reliabilitas laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan hukum, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.	1. Pembagian tanggung jawab 2. Penentuan kebijakan dan standar akuntansi 3. Implementasi kebijakan dan standar. ⁸⁵	Skala Likert
Standar Akuntansi Pemerintahan (X5)	Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sesuai PP No. 71 Tahun 2010.	1. Kesesuaian sistem dengan SAP 2. Pengidentifikasi transaksi 3. Bukti disetiap transaksi 4. Pengklasifikasian transaksi ⁸⁶	Skala Likert

⁸⁵ Untary and Ardiyanto, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang).”

⁸⁶ Nurillah and Muid, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok).”

3.6 Uji kelayakan Instrumen

Seluruh pengujian dalam penelitian ini menggunakan alat bantu aplikasi IBM SPSS statistic Versi 26. Diantara pengujian yang akan meliputi:

3.6.1 Uji Validitas

Untuk memastikan bahwa alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kuesioner, mampu memberikan hasil yang dapat dipercaya dan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, maka dilakukanlah uji validitas. Uji ini menjadi penting untuk mengetahui seberapa jauh representasi data terhadap kenyataan yang ada. Sebuah kuesioner baru bisa dikatakan valid apabila setiap pertanyaan yang ada di dalamnya berhasil menggambarkan variabel yang ingin diselidiki. Salah satu cara untuk melihatnya adalah dengan menguji seberapa kuat hubungan atau korelasi antara skor pada setiap pertanyaan dengan total skor keseluruhan variabelnya. Penelitian ini mengadopsi analisis statistik untuk pengujian validitas tersebut, yakni dengan menghitung korelasi Product Moment Pearson antara masing-masing butir pertanyaan dan skor total variabel. Sebuah data akan dianggap memenuhi syarat validitas jika angka r-hitung yang dihasilkan lebih besar daripada angka r-tabel, dengan acuan tingkat signifikansi sebesar 5%.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas diukur untuk menentukan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten⁸⁷. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pengukuran ulang (repeated measure) dan pengukuran sekali (one shot). Dalam

⁸⁷ Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & Spss."

penelitian ini, reliabilitas diukur menggunakan kuesioner dengan metode one shot, di mana pernyataan-pernyataan dibandingkan satu sama lain. Kuesioner dianggap reliabel jika jawaban yang diberikan oleh responden terhadap setiap butir pernyataan menunjukkan stabilitas dari waktu ke waktu⁸⁸. Pengujian reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α), di mana suatu variabel dapat dianggap reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,7 (0,70).

3.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam data penelitian yang akan dianalisis, serta untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan dapat diandalkan.

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan apakah variabel residual yang diuji mengikuti distribusi normal. Penilaian ini dapat dilakukan dengan menganalisis grafik histogram dan grafik normal probability plot. Data dianggap berdistribusi normal jika titik-titik yang muncul sejajar dengan garis diagonal dalam grafik dan tidak membentuk pola tertentu. Selain itu, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik melalui One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka residual dianggap terdistribusi normal; sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka residual dianggap tidak terdistribusi normal.

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikollinearitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian. Idealnya, model regresi yang baik tidak seharusnya

⁸⁸ Imam Ghazali, “Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23,” 2016.

menunjukkan adanya korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel-variabel tersebut saling berkorelasi, maka mereka tidak bersifat ortogonal. Variabel ortogonal memiliki nilai korelasi antar variabel bebas yang sama dengan nol. Untuk mendeteksi adanya korelasi dalam model regresi, kita dapat memeriksa nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Keputusan dari uji ini dapat didasarkan pada nilai Tolerance dan VIF sebagai berikut:

1. Jika nilai Tolerance $> 0,100$ dan nilai VIF $< 10,00$, maka tidak ada korelasi antar variabel.
2. Jika nilai Tolerance $< 0,100$ dan nilai VIF $> 10,00$, maka terdapat korelasi antar variabel.

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat ketidaksesuaian varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi⁸⁹. Keputusan dalam uji ini diambil dengan memperhatikan nilai signifikansi pada tingkat 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis antar variabel pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda dimana regresi berganda digunakan dengan maksud untuk mengetahui hubungan antar lebih dari dua variabel⁹⁰. Model Persamaan Regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

⁸⁹ Ghozali.

⁹⁰ Saadah, "Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 21, no. 01 (2018): 18–27.

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta $\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi

X_1 = Budaya Organisasi

X_2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_3 = Sistem Informasi Akuntansi

X_4 = Sistem Pengendalian Internal

X_5 = Standar Akuntansi Pemerintahan

ϵ = Error Term

3.8.2 Uji F Simultan

Uji F Simultan adalah metode yang digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen X berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen Y . Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi (sig) kurang dari 0,05, maka variabel independen X memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen Y .
2. Jika nilai signifikansi (sig) lebih dari 0,05, maka variabel independen X tidak memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen Y .

3.8.3 Uji T parsial

Uji T parsial dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen X terhadap variabel dependen Y . Tujuannya adalah untuk menentukan apakah variabel independen X memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y . Keputusan dari uji ini diambil berdasarkan kriteria berikut:

1. Jika nilai signifikansi (sig) kurang dari 0,05, maka variabel independen X berpengaruh terhadap variabel dependen Y .

2. Jika nilai signifikansi (sig) lebih dari 0,05, maka variabel independen X tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y.

3.8.4 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variabel dependen⁹¹. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol hingga satu. Jika nilai uji mendekati satu, ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini memberikan informasi yang signifikan untuk memprediksi variasi dari variabel terikat, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin mendekati angka satu, semakin besar pula kontribusi informasi dari variabel independen dalam memprediksi variasi variabel terikat.

⁹¹ Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23.”

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum objek penelitian

Menurut catatan sejarah, Asal nama Jepara berasal dari perkataan Ujung Para, Ujung Mara dan Jumpara yang kemudian menjadi Jepara yang berarti sebuah tempat pemukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah⁹². Jepara mulai dikenal pada abad ke-15 (1470 M) sebagai sebuah pelabuhan dagang berskala kecil di bawah kekuasaan Kerajaan Demak, dengan populasi sekitar 90 hingga 100 orang yang dipimpin oleh Aryo Timur. Setelah masa kepemimpinan Aryo Timur berakhir, tampuk kekuasaan dialihkan kepada putranya, Pati Unus (1507–1521), yang berhasil mengembangkan Jepara menjadi pusat perdagangan strategis. Pati Unus juga terkenal karena perlawanannya yang gigih terhadap kolonialisme Portugis di Malaka, wilayah yang menjadi simpul penting jaringan perdagangan Nusantara. Setelah kematian Pati Unus, pemerintahan Jepara diambil alih oleh saudara iparnya, Fatahillah (1521–1536). Pada 1536, Sultan Trenggono dari Demak menyerahkan kendali Jepara kepada putrinya, Ratu Retno Kencono, dan menantunya, Pangeran Hadlirin. Namun, setelah Sultan Trenggono wafat dalam ekspedisi militer di Panarukan, Jawa Timur (1546), konflik perebutan tahta Demak pecah dan berakhir dengan tewasnya Pangeran Hadlirin di tangan Aryo Penangsang pada 1549. Secara geografis, Jepara memiliki wilayah daratan yang luas diikuti garis pantai yang membentang sepanjang pesisirnya, mencerminkan karakteristik kota pesisir yang signifikan. Jepara terletak di wilayah utara Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat geografis antara $110^{\circ}9'48.02''$ – $110^{\circ}58'37.40''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}43'20.67''$ – $6^{\circ}47'25.83''$ Lintang Selatan. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah barat dan utara, Kabupaten Demak di selatan, serta Kabupaten Kudus dan Pati di timur. Jarak terdekat ke ibu kota kabupaten adalah Kecamatan

⁹² <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-jepara/page/sejarah/> (Diakses pada tanggal 17 Mei 2025 pukul 11.28)

Tahunan (7 km), sedangkan yang terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa (90 km). Kabupaten ini memiliki luas daratan 100.413,189 hektar (1.004,13 km²) yang terbagi menjadi 16 kecamatan, 184 desa, dan 11 kelurahan, serta wilayah laut seluas 2.112,836 km².

Dalam agenda pembangunannya, Kabupaten Jepara memedomani sebuah visi utama, yakni 'Menciptakan Jepara yang Beradab, Berkarakter, Progresif, dan Kompetitif'. Pencapaian visi ini didukung oleh lima misi strategis yang meliputi: pertama, peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) yang berkeunggulan, religius, dan menjunjung tinggi budaya; kedua, optimalisasi pemanfaatan kekayaan alam secara lestari demi kesejahteraan bersama; ketiga, pengembangan ekonomi daerah yang mandiri dan penuh dinamika; keempat, perluasan akses pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat; dan kelima, penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (dikenal sebagai *good governance*) sekaligus peningkatan standar profesionalisme dalam pelayanan publik.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pada setiap aktivitas pemerintah. Salah satu manifestasi penting dari tanggung jawab ini adalah penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak hanya akurat tetapi juga patuh terhadap regulasi yang berlaku. Penilaian kredibilitas laporan keuangan ini dilakukan melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai tolok ukur utama akuntabilitas. Kabupaten Jepara telah menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola keuangan yang unggul melalui perolehan opini WTP secara berkelanjutan dari tahun 2012 hingga 2024. Rangkaian prestasi ini bukan hanya cerminan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien, melainkan juga menegaskan status Jepara sebagai daerah yang maju dan profesional, serta secara signifikan memperkokoh kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerahnya."

4.2 Karakteristik responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini merupakan aparatur akuntansi dari setiap opd yang terdiri dari 18 dinas, 16 kecamatan, 5 badan, 2 sekertariat dan inspektorat. Karakteristik responden dalam sampel penelitian dikelompokkan berdasarkan kategori usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lama masa kerja. Data persentase distribusi karakteristik tersebut selanjutnya diuraikan untuk menggambarkan profil partisipan penelitian.

4.2.1 karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel 4. 1 Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia (Tahun)	Jumlah	Presentase
20-30 Tahun	15	45.45%
31-40 Tahun	9	27.27%
41-50 Tahun	7	21.21%
51- 60 Tahun	2	6.06%
Total	33	100%

Sumber: Data diolah

Distribusi Distribusi usia responden dalam penelitian ini menunjukkan pola yang menarik. Kelompok usia 20-30 tahun muncul sebagai kelompok dominan dengan 15 responden (45.45%), mengindikasikan bahwa sebagian besar dari total sampel berada dalam kategori usia muda produktif. Diikuti oleh kelompok usia 31-40 tahun yang menyumbang 9 responden (27.27%), dan kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 7 responden (21.21%). Sementara itu, partisipasi kelompok usia 51-60 tahun merupakan yang paling kecil dengan hanya 2 responden (6.06%), menunjukkan keterwakilan yang lebih terbatas dari kelompok usia yang lebih senior dalam sampel ini.

4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan jumlah kelamin

Tabel 4. 2 Karakteristik responden berdasarkan jumlah kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
Perempuan	25	75.76%
Laki - laki	8	24.24%
Total	33	100%

Sumber: Data diolah

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam komposisi sampel penelitian ini. Dari total 33 responden, kelompok perempuan mendominasi dengan jumlah 25 orang (75.76%), sementara laki-laki hanya terwakili oleh 8 responden (24.24%). Hal ini menciptakan rasio gender yang tidak seimbang sekitar 3.1 : 1 antara perempuan dan laki-laki.

Tabel 4. 3 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SMA/SMK	4	12.12%
D-3	12	36.36%
S-1	15	45.45%
S-2	2	6.06%
Total	33	100%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Berdasarkan data tingkat pendidikan yang dikumpulkan dari 33 responden, terlihat bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan Strata-1 (S-1) dengan jumlah 15 orang atau 45.45%. Pendidikan Diploma-3 (D-3) menempati posisi kedua dengan 12 responden (36.36%), diikuti oleh SMA/SMK sebanyak 4 orang (12.12%), dan Strata-2 (S-2) sebagai kelompok terkecil dengan 2 responden (6.06%).

4.2.4 Karakteristik berdasarkan masa kerja

Tabel 4. 4 Karakteristik responden berdasarkan masa kerja

Masa kerja (tahun)	Jumlah	Presentase
1-5 tahun	15	45.45%
6-10 tahun	3	9.09%
>10 tahun	15	45.45%
Jumlah	33	100%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data pengalaman kerja dari 33 responden, terlihat bahwa terdapat dua kelompok dominan dengan jumlah yang sama: responden dengan pengalaman kerja dalam rentang 1-5 tahun sebanyak 15 orang (45.45%), dan kelompok dengan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun juga sebanyak 15

responden (45.45%). Hal ini menunjukkan adanya proporsi yang seimbang antara tenaga kerja yang relatif baru atau junior dengan tenaga kerja yang sangat berpengalaman atau senior dalam sampel ini. Sementara itu, kelompok dengan pengalaman kerja 6-10 tahun merupakan yang paling sedikit, hanya berjumlah 3 orang (9.09%)

4.3 Analisis deskriptif

4.3.1 Analisis deskriptif variable

Tabel 4. 5 Hasil uji statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Sumber Daya Manusia	33	19	30	24.67	2.869
Sistem Informasi Akuntansi	33	19	30	25.36	2.903
Sistem Pengendalian Intern	33	19	30	25.67	3.256
Budaya Organisasi	33	21	30	25.33	2.780
Standar Akuntansi Pemerintah	33	22	30	25.94	2.410
Kualitas Laporan Keuangan	33	22	30	26.09	2.662
Valid N (listwise)	33				

Sumber : data diolah

Hasil statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum mengenai beberapa variabel yang berkaitan dengan sistem akuntansi dan laporan keuangan pada 33 entitas yang diamati. Hasil statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum mengenai beberapa variabel yang berkaitan dengan sistem akuntansi dan laporan keuangan pada 33 entitas yang diamati. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki rata-rata sebesar 24.67 dengan rentang nilai antara 19 hingga 30 dan standar deviasi 2.869. Hal ini mengindikasikan adanya variasi dalam persepsi atau kondisi kompetensi SDM antar entitas, meskipun tidak sebesar pada beberapa variabel lain. Sementara itu, Sistem Informasi Akuntansi memiliki rata-rata 25.36 dengan standar deviasi 2.903, yang menunjukkan tingkat variasi yang sedikit lebih tinggi

dibandingkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, mengindikasikan perbedaan dalam implementasi atau efektivitas sistem informasi akuntansi antar entitas.

Variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki rata-rata 25.67 dengan standar deviasi yang relatif lebih tinggi, yaitu 3.256. Hal ini mencerminkan tingkat variasi persepsi atau penerapan yang paling beragam di antara semua variabel yang diamati dalam dataset ini, menunjukkan bahwa kondisi sistem pengendalian intern cukup bervariasi antar entitas. Budaya Organisasi memiliki rata-rata 25.33 dengan standar deviasi 2.780, mengindikasikan variasi yang lebih rendah dibandingkan Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi, menunjukkan konsistensi yang lebih baik dalam budaya organisasi di entitas yang diamati.

Standar Akuntansi Pemerintah menunjukkan rata-rata yang cukup tinggi, yaitu 25.94, dengan rentang nilai dari 22 hingga 30 dan standar deviasi terendah (2.410). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar entitas telah memiliki persepsi yang relatif seragam dan positif terhadap pemahaman atau penerapan standar akuntansi pemerintah, dengan variasi yang paling kecil di antara semua variabel.

Kualitas Laporan Keuangan mencatat rata-rata tertinggi, yaitu 26.09, dengan standar deviasi 2.662. Ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap kualitas laporan keuangan dihasilkan dengan tingkat yang paling tinggi dan konsistensi yang cukup baik di seluruh entitas. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa aspek-aspek seperti Kualitas Laporan Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah dinilai paling tinggi dan paling konsisten. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan dan penyeragaman, terutama dalam hal Sistem Pengendalian Intern yang menunjukkan variasi persepsi paling tinggi. Upaya peningkatan dapat difokuskan pada variabel-variabel yang masih menunjukkan variasi tinggi untuk mencapai keseragaman dan kualitas yang lebih baik secara menyeluruh.

4.4. Hasil Uji Kelayakan Instrumen

4.4.1 Uji Validitas

Uji Validitas data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode Product Moment Pearson Correlations dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel. Apabila nilai r hitung > nilai r tabel maka pernyataan pada tiap-tiap variabel dinyatakan valid. Nilai r tabel dapat diperoleh melalui tabel dengan perhitungan rumus berikut:

$$DF = N - 2$$

$$DF = 33 - 2$$

$$DF = 31$$

Diperoleh hasil perhitungan yaitu 31 pada tabel dengan Tingkat signifikansi 0.05 (uji dua sisi), maka didapatkan nilai r tabel sebesar 0.344. Berikut tabel ringkasan hasil perhitungan uji validitas pada tiap butir pernyataan:

Tabel 4. 6 Hasil uji validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kualitas laporan keuangan (Y)	Y1	0.713	0.344	Valid
	Y2	0.540	0.344	Valid
	Y3	0.636	0.344	Valid
	Y4	0.578	0.344	Valid
	Y5	0.629	0.344	Valid
	Y6	0.657	0.344	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	X1.1	0.791	0.344	Valid
	X1.2	0.732	0.344	Valid
	X1.3	0.645	0.344	Valid
	X1.4	0.828	0.344	Valid
	X1.5	0.756	0.344	Valid

	X1.6	0.795	0.344	Valid
Sistem Informasi Akuntansi(X2)	X2.1	0.782	0.344	Valid
	X2.2	0.775	0.344	Valid
	X2.3	0.755	0.344	Valid
	X2.4	0.775	0.344	Valid
	X2.5	0.720	0.344	Valid
	X2.6	0.755	0.344	Valid
Sistem Pengendalian Intern (X3)	X3.1	0.660	0.344	Valid
	X3.2	0.747	0.344	Valid
	X3.3	0.717	0.344	Valid
	X3.4	0.691	0.344	Valid
	X3.5	0.804	0.344	Valid
	X3.6	0.820	0.344	Valid
Budaya Organisasi (X4)	X4.1	0.725	0.344	Valid
	X4.2	0.831	0.344	Valid
	X4.3	0.787	0.344	Valid
	X4.4	0.674	0.344	Valid
	X4.5	0.770	0.344	Valid
	X4.6	0.803	0.344	Valid
Standar Akuntansi Pemerintahan (X5)	X5.1	0.691	0.344	Valid
	X5.2	0.663	0.344	Valid
	X5.3	0.784	0.344	Valid
	X5.4	0.849	0.344	Valid
	X5.5	0.778	0.344	Valid
	X5.6	0.813	0.344	Valid

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel rangkuman hasil uji validitas pada 33 responden untuk semua pernyataan pada setiap variabel terlihat bahwa semua item pernyataan

menunjukkan nilai r hitung $>$ r tabel. Jadi kesimpulannya semua pernyataan yang tertera pada masing-masing variabel dinyatakan valid

4.4.2 Uji Reabilitas

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menganalisis koefisien Cronbach's Alpha memanfaatkan software SPSS Versi 26. Kriteria reliabilitas ditetapkan dengan acuan bahwa suatu item pertanyaan dinyatakan konsisten jika memperoleh nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70

Tabel 4. 7 Hasil uji reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Angka Reabilitas	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,881	0,70	Reliabel
Sistem Informasi Akuntansi	0,884	0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,891	0,70	Reliabel
Budaya Organisaasi	0,897	0,70	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintahan	0,981	0,70	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,867	0,70	Reliabel

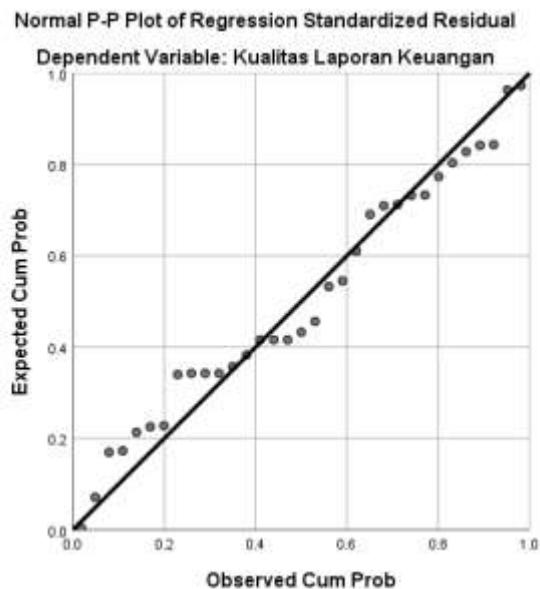
Sumber: Data diolah

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa residual dari model regresi terdistribusi secara normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat melalui grafik normal probability plot, yang menunjukkan sejauh mana data residual mengikuti pola distribusi normal. Berikut adalah hasil analisis uji normalitas berdasarkan grafik tersebut:

Gambar 4.1



Gambar 4. 1 Grafik Normal Probability Plot

Berdasarkan hasil analisis grafik normal probability plot, terlihat bahwa plot residual membentuk pola linear searah dengan garis diagonal tanpa menunjukkan penyimpangan yang sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi distribusi normal.

Sebagai pelengkap analisis grafis, uji normalitas juga dilakukan dengan metode statistik non-parametrik menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test melalui software SPSS versi 26. Pendekatan ganda ini dilakukan untuk memperkuat validitas hasil pengujian normalitas, di mana kesesuaian antara hasil analisis visual (probability plot) dan uji statistik (Kolmogorov-Smirnov) akan memberikan konfirmasi yang lebih komprehensif mengenai terpenuhinya asumsi normalitas dalam model penelitian. Berikut hasil uji non parametrik kolmogorov smirnov melalui aplikasi SPSS V.26:

Tabel 4. 8 Hasil uji normalitas - One sample kolmogorov smirnov test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardiz ed Residual
N	33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean .0000000

	Std. Deviation	.86120314
Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative	.114 .093 -.114
Test Statistic		.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data diolah

jika nilai signifikansi kolmogrov smirnov > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa residual variabel penelitian telah terdistribusi secara normal. Dari tabel datas dapat dilihat nilai test statistic pada One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test adalah sebesar 0,114 dan nilai signifikan pada 0,200. Dengan demikian pada penelitian ini disimpulkan bahwa residual terlah terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan korelasi antara variabel-variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian. Penentuan hasil uji ini didasarkan pada dua indikator, yaitu nilai *tolerance* dan *VIF* (Variance Inflation Factor). Kriteria yang digunakan adalah jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel penelitian. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 26:

Tabel 4. 9 Hasil Uji multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.113	1.919		1.622	.116		
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.225	.094	.242	2.389	.024	.377	2.652
Sistem Informasi Akuntansi	.500	.107	.546	4.686	.000	.286	3.496
Sistem Pengendalian Intern	-.727	.080	-.889	-9.101	.000	.406	2.464
Budaya Organisasi	.367	.115	.384	3.204	.003	.270	3.700
Standar Akuntansi Pemerintah	.544	.104	.492	5.206	.000	.434	2.305

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data diolah

Uji multikolinearitas Dari hasil uji diatas masing – masing variabel mendapatkan nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia mendapatkan nilai *Tolerance* .377 dan nilai VIF sebesar 2.652.

- Pada variabel Sistem Informasi Akuntansi mendapatkan nilai *Tolerance* .286 dan nilai VIF sebesar 3.496.
- Pada variabel Sistem Pengendalian Intern mendapatkan nilai *Tolerance* .406 dan mendapatkan nilai VIF 2.464.
- Pada variabel Budaya Organisasi mendapatkan nilai *Tolerance* .270 dan mendapatkan nilai VIF 3.700.
- Dan pada variabel Standar Akuntansi Pemerintah mendapatkan nilai *Tolerance* .434 dan nilai VIF 2.305.

Maka kesimpulannya, berdasarkan nilai *Tolerance* yang semuanya di atas 0,10 dan nilai VIF yang semuanya di bawah 10, tidak terjadi masalah

multikolinearitas yang serius antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas.

Uji ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah model regresi memiliki varians residual yang tidak konsisten antar pengamatan. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan Uji White untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak adanya heteroskedastisitas (homoskedastis), sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan adanya heteroskedastisitas. Pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan nilai signifikansi (p-value) hasil uji dengan tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan (0.05). Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_0 gagal ditolak, yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS versi 26:

Tabel 4. 10 Hasil Uji heteroskedastisitas

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.856 ^a	.732	.388	1.00322

a. Predictors: (Constant), X4X5, X1, X3, X2, X5, X2Kuadrat, X1X5, X3Kuadrat, X4, X1X3, X3X5, X2X5, X2X4, X5Kuadrat, X1X2, X4Kuadrat, X1X4, X3X4

Model	ANOVA ^a					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	18	2.140	2.126	.079 ^b	
	Residual	14	1.006			
	Total	32				

a. Dependent Variable: U2T

b. Predictors: (Constant), X4X5, X1, X3, X2, X5, X2Kuadrat, X1X5, X3Kuadrat, X4, X1X3, X3X5, X2X5, X2X4, X5Kuadrat, X1X2, X4Kuadrat, X1X4, X3X4

Sumber: Data diolah

Berdasarkan output SPSS dari *auxiliary regression* yang dilakukan untuk Uji White, diperoleh nilai R² sebesar 0.732. Dengan jumlah observasi (N) sebanyak 33, nilai Chi-Square hitung ($N \times R^2$) adalah $33 \times 0.732 = 24.156$. Nilai ini dibandingkan dengan nilai Chi-Square tabel untuk derajat kebebasan (df) 18 pada $\alpha=0.05$, yaitu 28.869. Karena Chi-Square hitung (24.156) < Chi-Square tabel (28.869), ini mengindikasikan tidak adanya heteroskedastisitas. Maka hipotesis nol (H_0) gagal ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda ditujukan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat⁹³. Dalam penelitian ini, variabel bebas (X) yang akan dianalisis terdiri dari Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap variabel terikat (Y) yaitu Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 4. 11 Hasil uji hipotesis - uji regresi linear berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.

⁹³ Siregar, "Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & Spss."

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,113	1,919		1,622	,116
	Budaya organisasi	,367	,115	,384	3,204	,003
	Kompetensi sumber daya manusia	,225	,094	,242	2,389	,024
	Sistem informasi akuntansi	,500	,107	,546	4,686	,000
	Sistem pengendalian internal	-,727	,080	-,889	-9,101	,000
	Standar akuntansi pemerintahan	,544	,104	,492	5,206	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber Data diolah

$$Y = 3,113 + 0,367 X_1 + 0,225 X_2 + 0,500 X_3 - 0,727 X_4 + 0,544 X_5$$

Dimana:

- Y = Kualitas Laporan Keuangan
- X₁ = Budaya organisasi
- X₂ = Kompetensi sumber daya manusia
- X₃ = Sistem informasi akuntansi
- X₄ = Sistem pengendalian intern
- X₅ = Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (a) Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 3.113. Artinya, jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan dianggap konstan (bernilai nol), maka Kualitas Laporan Keuangan akan bernilai sebesar 3.113.
2. Nilai Koefisien Regresi pada Variabel Budaya Organisasi (X₁) Nilai koefisien regresi untuk Budaya Organisasi (X₁) adalah sebesar 0,367. Artinya, apabila variabel Budaya Organisasi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sedangkan variabel bebas lainnya tetap (konstan),

maka Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.367 satuan.

3. Nilai Koefisien Regresi pada Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) Nilai koefisien regresi untuk Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) adalah sebesar 0.225. Artinya, apabila variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sedangkan variabel bebas lainnya tetap (konstan), maka Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.225 satuan.
4. Nilai Koefisien Regresi pada Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X3) Nilai koefisien regresi untuk Sistem Informasi Akuntansi (X3) adalah sebesar 0.500. Artinya, apabila variabel Sistem Informasi Akuntansi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sedangkan variabel bebas lainnya tetap (konstan), maka Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.500 satuan.
5. Nilai Koefisien Regresi pada Variabel Sistem Pengendalian Intern (X4) Nilai koefisien regresi untuk Sistem Pengendalian Intern (X4) adalah sebesar -0.727. Artinya, apabila variabel Sistem Pengendalian Intern mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sedangkan variabel bebas lainnya tetap (konstan), maka Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.727 satuan.
6. Nilai Koefisien Regresi pada Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X5) Nilai koefisien regresi untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (X5) adalah sebesar 0.544. Artinya, apabila variabel Standar Akuntansi Pemerintahan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sedangkan variabel bebas lainnya tetap (konstan), maka Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.544 satuan.

4.7 Uji Hipotesis Penelitian

4.7.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan, yang sering disebut Uji F, adalah sebuah pengujian statistik yang digunakan untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh seluruh variabel independen (bebas) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (terikat) dalam sebuah model regresi.

Tabel 4. 12 Hasil uji hipotesis - uji simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	202.994	5	40.599	46.187	.000 ^b
	Residual	23.733	27	.879		
	Total	226.727	32			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia , Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi , Budaya Organisasi

Sumber: Data diolah

Dapat dilihat bahwa nilai F hitung menunjukkan nilai sebesar 46.187. Nilai ini sudah lebih besar dari nilai F tabel (untuk $\alpha=0.05$, $df_1=5$, $df_2=27$) yaitu sekitar 2.53. Jadi, $46.187 > 2.53$, dengan nilai sig. (0.000) kurang dari 0.05.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen yang terdiri atas Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan.

4.7.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji T parsial dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel independen (X) yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem

Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel dependen (Y) yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 13 Hasil Uji hipotesis - uji parsial (Uji T)

Model	Coefficients^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,113	1,919		1,622	,116
	Budaya organisasi	,367	,115	,384	3,204	,003
	Kompetensi sumber daya manusia	,225	,094	,242	2,389	,024
	Sistem informasi akuntansi	,500	,107	,546	4,686	,000
	Sistem pengendalian internal	-,727	,080	-,889	-9,101	,000
	Standar akuntansi pemerintahan	,544	,104	,492	5,206	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data diolah

Dalam uji t kali ini, diperoleh nilai t tabel sebesar 2.052 pada tingkat signifikansi 0.05 dengan df=27 (uji dua sisi). Berdasarkan tabel uji t parsial di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada uji t ini, variabel Budaya Organisasi (X1) memperoleh nilai t hitung sebesar 3.204 dengan nilai Sig. 0.003. Karena nilai t hitung (3.204) > t tabel (2.052) dan nilai Sig. (0.003) < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya, H1 diterima. Semakin kuat dan kondusif budaya organisasi dalam mendukung praktik

akuntansi yang baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik.

- b. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada uji t ini, variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) memperoleh nilai t hitung sebesar 2.389 dengan nilai Sig. 0.024. Karena nilai t hitung (2.389) > t tabel (2.052) dan nilai Sig. (0.024) < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya, H2 diterima. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pun akan semakin baik.
- b. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada uji t ini, variabel Sistem Informasi Akuntansi (X3) memperoleh nilai t hitung sebesar 4.686 dengan nilai Sig. 0.000. Karena nilai t hitung (4.686) > t tabel (2.052) dan nilai Sig. (0.000) < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya, H3 diterima. Semakin efektif Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin meningkat.
- c. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada uji t ini, variabel Sistem Pengendalian Intern (X4) memperoleh nilai t hitung sebesar -9.101 dengan nilai Sig. 0.000. Karena nilai |t hitung| (9.101) > t tabel (2.052) dan nilai Sig. (0.000) < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya, H4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa (sesuai data ini) peningkatan dalam aspek Sistem Pengendalian Intern yang diukur justru berkaitan dengan penurunan kualitas laporan keuangan. Interpretasi ini mungkin memerlukan tinjauan lebih lanjut terhadap

bagaimana variabel ini diukur atau adanya kondisi spesifik dalam konteks penelitian, karena secara teori SPI diharapkan berpengaruh positif.

- e. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada uji t ini, variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X5) memperoleh nilai t hitung sebesar 5.206 dengan nilai Sig. 0.000. Karena nilai t hitung (5.206) > t tabel (2.052) dan nilai Sig. (0.000) < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya, H5 diterima. Semakin tinggi tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin meningkat.

4.8 Uji Koefisien Determinasi

koefisien determinasi atau yang sering disebut R-squared adalah ukuran statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk menilai seberapa baik model regresi menjelaskan variasi dalam variabel dependen (terikat) berdasarkan variabel independen (bebas).

Tabel 4. 14 Hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R Square)

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.946 ^a	.895	.876	.938	

a. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia , Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi , Budaya Organisasi

Sumber: Data diolah

Artinya, 87.6% variasi yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (variabel dependen) dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini (yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, dan Budaya Organisasi). Sedangkan sisanya sebesar

12.4% (100% - 87.6%) dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lainnya di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.9 Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Informasi Akuntansi (X2), Sistem Pengendalian Intern (X3), Budaya Organisasi (X4), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (X5) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara (Y) dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.9.1 Pengaruh Budaya Organisasi (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Hasil Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa variabel Budaya Organisasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada OPD Kabupaten Jepara. Hal ini didukung oleh data statistik dari uji t yang menunjukkan nilai t hitung untuk X4 sebesar 3.204 dengan nilai signifikansi 0.003. Karena nilai t hitung (3.204) lebih besar dari nilai t tabel (2.052) dan nilai signifikansi (0.003) lebih kecil dari 0.05, maka H_4 diterima. Koefisien regresi yang positif sebesar 0.367 mengindikasikan bahwa penguatan budaya organisasi yang kondusif akan diikuti oleh peningkatan kualitas laporan keuangan.

Interpretasi dari temuan ini adalah bahwa semakin kuat dan positif budaya organisasi yang dianut dan dipraktikkan di lingkungan OPD Kabupaten Jepara, yang mencakup aspek hierarchy (struktur organisasi yang teratur dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas) dan clan (budaya organisasi yang kolaboratif, berorientasi pada nilai kebersamaan, kepercayaan, serta komitmen bersama), maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Budaya organisasi yang mendukung praktik akuntansi yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan integritas akan mendorong perilaku individu dan kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi, termasuk penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Temuan ini konsisten dengan sejumlah penelitian sebelumnya. Penelitian Dewi Yesiana

Rahman⁹⁴ dan Setyowati⁹⁵ menunjukkan adanya hubungan signifikan antara budaya organisasi dan kualitas laporan keuangan. Hasil ini juga mendukung temuan Inwanda⁹⁶ dan Andari⁹⁷ yang melaporkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Keselarasan ini memperkuat pandangan bahwa aspek non-teknis seperti budaya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas output organisasi.

Dalam kerangka Teori Keagenan, budaya organisasi yang kuat dan positif dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian informal (soft control) yang efektif. Ketika terdapat potensi divergensi kepentingan antara prinsipal (masyarakat/DPRD) dan agen (manajemen OPD), budaya yang menanamkan nilai-nilai luhur seperti integritas, akuntabilitas, dan transparansi dapat membantu menyelaraskan perilaku agen dengan kepentingan prinsipal. Agen yang telah menginternalisasi nilai-nilai ini akan cenderung termotivasi secara intrinsik untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan andal, karena hal tersebut sejalan dengan norma dan ekspektasi organisasi, sehingga mengurangi risiko moral hazard. Keterkaitan dengan nilai-nilai Islam seperti amanah (kepercayaan) dan qisth (keadilan), sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8, juga sangat relevan. Budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai tersebut akan mendorong penyajian laporan keuangan yang adil, benar, dan bertanggung jawab. Mengingat temuan yang kontradiktif pada pengaruh Sistem Pengendalian Intern (H4) yang menunjukkan hasil negatif, peran budaya organisasi yang positif menjadi semakin penting. Ada kemungkinan bahwa budaya organisasi yang kuat di OPD Kabupaten Jepara memainkan peran kompensatoris atau bahkan lebih dominan dalam mendorong kualitas laporan keuangan ketika sistem kontrol formal mungkin memiliki

⁹⁴ Dewi Yesiana Rahman, Erlin Rohmawati, Ninis Sriyani, "PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN."

⁹⁵ Setyowati et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan."

⁹⁶ Inwanda, Mawardi, and Sari, "Pengaruh Teknologi Informasi, Budaya Organisasi Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang)."

⁹⁷ Andari, "Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh."

kelemahan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jika kontrol formal lemah atau problematik, maka kontrol informal melalui budaya menjadi benteng pertahanan untuk menjaga kualitas. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai organisasi seperti integritas dan profesionalisme mungkin akan tetap berusaha menghasilkan laporan yang baik meskipun sistem kontrol formalnya kurang mendukung atau bahkan dianggap sebagai penghambat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jepara perlu terus berupaya memperkuat budaya organisasi yang positif, yang menekankan integritas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kolaborasi. Upaya ini dapat dilakukan melalui kepemimpinan yang memberikan teladan, program pelatihan etika yang berkelanjutan, serta penciptaan sistem penghargaan yang mendukung perilaku yang diinginkan.

4.9.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara. Dukungan statistik untuk temuan ini berasal dari hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung untuk X2 sebesar 2.389 dengan nilai signifikansi 0.024. Oleh karena nilai t hitung (2.389) lebih besar dari nilai t tabel (2.052) dan nilai signifikansi (0.024) lebih kecil dari 0.05, maka H_1 dalam penelitian ini diterima. Koefisien regresi yang positif sebesar 0.225 juga mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pada kompetensi sumber daya manusia akan diikuti dengan peningkatan kualitas laporan keuangan.

Temuan ini mengisyaratkan bahwa tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pengelola keuangan di lingkungan OPD Kabupaten Jepara memegang peranan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi tersebut, yang diukur melalui pemahaman terhadap peraturan dan standar serta partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan, menjadi fondasi bagi penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Sumber daya manusia yang kompeten cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip akuntansi, standar yang berlaku, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya secara efektif dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Nurillah⁹⁸ dan Pujanira⁹⁹ juga menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Keselarasan ini memperkuat argumen bahwa kualitas individu yang terlibat langsung dalam siklus akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan determinan penting bagi output yang dihasilkan. Namun demikian, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Sulaiman¹⁰⁰ dan Triwardana¹⁰¹, yang menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil, khususnya dengan Sulaiman¹⁰² yang juga meneliti di Kabupaten Jepara, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Ini bisa mencakup perbedaan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) spesifik yang dijadikan sampel dalam kedua penelitian, perubahan kondisi atau kebijakan terkait SDM di Kabupaten Jepara antara periode penelitian Sulaiman¹⁰³ dan penelitian ini, atau pengaruh dari variabel baru 'Budaya Organisasi' yang dimasukkan dalam model penelitian ini yang mungkin

⁹⁸ Nurillah and Muid, ‘Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok).’

⁹⁹ Pujanira, ‘Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.’

¹⁰⁰ Sulaiman and Nurharjanti, ‘Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara).’

¹⁰¹ Triwardana, Yusralaini, and Susilatri, ‘Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar).’

¹⁰² Sulaiman and Nurharjanti, ‘Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara).’

¹⁰³ Sulaiman and Nurharjanti.

berinteraksi dengan kompetensi SDM. Selain itu, variasi dalam instrumen penelitian atau metodologi analisis data yang lebih detail juga bisa berkontribusi pada perbedaan temuan tersebut. Penelitian saat ini, sebagai pengembangan, mungkin menangkap dinamika atau aspek yang berbeda.

Secara teoritis, temuan ini sangat mendukung kerangka Teori Keagenan (Agency Theory). Dalam konteks sektor publik, pemerintah daerah (agen) memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan DPRD (prinsipal). Sumber daya manusia yang kompeten pada posisi agen akan lebih mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal, sehingga mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi akan mempermudah prinsipal dalam melakukan evaluasi dan pengawasan, yang pada akhirnya dapat menekan agency costs. Kompetensi SDM, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku individu, menjadi krusial. SDM yang berkualitas tidak hanya memahami teknis akuntansi tetapi juga mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan benar dan mengoperasikan sistem pendukung secara efektif. Penekanan pada indikator pemahaman peraturan dan standar serta pendidikan dan pelatihan menggarisbawahi bahwa investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas SDM adalah kunci. Hal ini juga selaras dengan perspektif Islam yang menekankan pentingnya "kekuatan" (al-qawiyy) atau kompetensi dan "amanah" (al-amin) atau integritas dalam mengemban setiap tanggung jawab, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. Al-Qasas ayat 26. Dengan demikian, peningkatan kompetensi SDM di OPD Kabupaten Jepara diharapkan akan terus mendorong perbaikan kualitas laporan keuangan, yang berdampak positif pada akuntabilitas dan kepercayaan publik.

4.9.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi Akuntansi (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas

Laporan Keuangan (Y) pada OPD Kabupaten Jepara. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung untuk X3 sebesar 4.686 dengan nilai signifikansi 0.000. Mengingat nilai t hitung (4.686) lebih besar dari nilai t tabel (2.052) dan nilai signifikansi (0.000) jauh lebih kecil dari 0.05, maka H3 diterima. Nilai koefisien regresi yang positif dan cukup besar, yaitu 0.500, semakin mempertegas bahwa Sistem Informasi Akuntansi memberikan kontribusi yang kuat dan positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Interpretasi dari temuan ini adalah bahwa efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi di OPD Kabupaten Jepara, yang mencakup kualitas alat dan sumber daya manusia yang mengelolanya, keandalan jurnal dan catatan akuntansi, serta relevansi dan akurasi laporan atau informasi yang dihasilkan, secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. SIA yang baik akan memfasilitasi proses pencatatan transaksi yang akurat, pengolahan data yang benar, dan penyajian informasi keuangan yang tepat waktu serta sesuai dengan standar yang berlaku. Temuan ini konsisten dengan sebagian besar penelitian terdahulu. Penelitian oleh Inwanda, Mawardi, dan Sari¹⁰⁴ serta Andari¹⁰⁵ juga menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara efektivitas sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Yanti, Made, Wahyu¹⁰⁶ yang menemukan bahwa SIA tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kota Malang. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kecanggihan SIA yang digunakan, derajat integrasi sistem antar unit, kompetensi pengguna sistem di masing-masing lokasi penelitian, atau bahkan

¹⁰⁴ Inwanda, Mawardi, and Sari, "Pengaruh Teknologi Informasi, Budaya Organisasi Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang)."

¹⁰⁵ Andari, "Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh."

¹⁰⁶ Yanti et al., "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah."

perbedaan dalam budaya organisasi yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi.

Dari perspektif Teori Keagenan, SIA yang efektif memainkan peran vital dalam mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat atau DPRD sebagai prinsipal. Dengan SIA yang canggih dan terintegrasi, data keuangan dapat diproses secara akurat, cepat, dan transparan, menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan informatif. Hal ini memungkinkan prinsipal untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif. Lebih lanjut, SIA yang berkualitas seringkali dilengkapi dengan pengendalian internal yang tertanam dalam sistem (*embedded internal controls*), yang membatasi ruang bagi agen untuk melakukan tindakan oportunistik. Keterkaitan dengan nilai-nilai Islam, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi keuangan secara tertulis, jelas, dan adil, juga sangat relevan. Dalam konteks modern, SIA dapat dipandang sebagai "penulis" yang mencatat transaksi secara akurat dan tanpa manipulasi, sejalan dengan perintah untuk tidak mengurangi sedikitpun dari pencatatan tersebut.

Pengaruh positif SIA yang kuat dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa investasi dalam teknologi dan sistem akuntansi yang modern dan terintegrasi memberikan dampak nyata pada kualitas pelaporan di OPD Kabupaten Jepara. Hal ini juga dapat mengisyaratkan bahwa kompetensi SDM (sebagaimana temuan H2 yang positif) kemungkinan telah memadai untuk memanfaatkan SIA tersebut secara efektif. Oleh karena itu, OPD Kabupaten Jepara disarankan untuk terus melakukan pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan kapasitas SIA, serta memastikan adanya pelatihan yang berkelanjutan bagi para pengguna agar manfaat sistem dapat dimaksimalkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang semakin berkualitas.

4.9.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_4) dalam penelitian ini menyajikan temuan yang menarik dan kontradiktif dengan ekspektasi teoritis umum serta mayoritas penelitian sebelumnya. Temuan negatif dan signifikan ($t=-9.101$, $Sig=0.000$, Koefisien=-0.727) maka H_4 ditolak. Temuan ini diakui secara eksplisit sebagai temuan yang kontradiktif. Interpretasi yang kontradiktif ini memerlukan kehati-hatian dan analisis mendalam. Penting untuk ditekankan bahwa hasil ini spesifik pada aspek-aspek Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diukur melalui kuesioner dalam penelitian ini dan pada sampel responden saat ini ($N=33$) di OPD Kabupaten Jepara. Temuan ini tidak serta-merta berarti bahwa konsep SPI secara fundamental berdampak buruk terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, pengaruh negatif yang teridentifikasi lebih mungkin mencerminkan bagaimana SPI dipersepsi, dirancang, diimplementasikan, atau dialami oleh para responden dalam konteks spesifik mereka. Ada kemungkinan bahwa SPI yang ada, atau aspek-aspek tertentu darinya, dianggap sebagai beban administratif, terlalu kaku, tidak selaras dengan kebutuhan operasional, atau bahkan diimplementasikan dengan cara yang kontrapunktif sehingga justru menghambat penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Indrasari dan Ismunawan¹⁰⁷ serta Modo¹⁰⁸ yang menemukan pengaruh positif SPI terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula, hasil ini berbeda dengan penelitian

¹⁰⁷ Indrasari dan Ismunawan, "Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan."

¹⁰⁸ Modo, Saerang, and Poputra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud)."

Nurillah¹⁰⁹ dan Sulaiman¹¹⁰ yang juga melaporkan pengaruh positif SPI. Namun, penting untuk dicatat bahwa beberapa penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Dinda Dwi Kansah¹¹¹ dan Mokoginta¹¹², juga menemukan pengaruh negatif dan signifikan dari SPI terhadap kualitas laporan keuangan, ini memberikan preseden bahwa temuan semacam ini bukanlah anomali yang terisolasi. Perbedaan temuan dengan penelitian Sulaiman¹¹³, yang juga dilakukan di OPD Kabupaten Jepara dan menemukan pengaruh positif SPI, menambah kompleksitas interpretasi. Spekulasi mengenai perbedaan ini dapat mencakup variasi dalam sampel OPD yang terlibat, perubahan dalam implementasi atau persepsi SPI di Jepara antara periode kedua penelitian, atau bagaimana masuknya variabel 'Budaya Organisasi' dalam model penelitian ini mungkin telah mengubah dinamika hubungan antar variabel. Misalnya, jika budaya organisasi sudah sangat kuat dan positif, SPI formal yang kaku mungkin dirasakan kurang relevan atau bahkan menghambat oleh staf yang sudah memiliki komitmen internal tinggi.

Secara teoritis, Teori Keagenan memandang SPI sebagai mekanisme krusial bagi prinsipal untuk mengawasi tindakan agen dan memastikan keandalan pelaporan keuangan. Temuan negatif ini mengindikasikan bahwa SPI di OPD Kabupaten Jepara mungkin belum berfungsi optimal dalam memenuhi peran tersebut. Peneliti menawarkan beberapa penjelasan akademis

¹⁰⁹ Nurillah and Muid, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)."

¹¹⁰ Sulaiman and Nurharjanti, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara)."

¹¹¹ Kansah, Utamingtyas, and Fauzi, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi."

¹¹² Mokoginta, Lambey, and Pontoh, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah."

¹¹³ Sulaiman and Nurharjanti, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara)."

yang masuk akal, seperti masalah dalam desain, implementasi, efektivitas, persepsi SPI, sifat birokratis, audit yang lemah, ketidakresponsifan, keterbatasan sumber daya, atau bahkan efek substitusi. Nilai t yang sangat tinggi (-9.101) menunjukkan bahwa dampak negatif ini bukan marginal tetapi merupakan efek statistik yang sangat kuat dalam sampel dan model spesifik ini. Ini, dikombinasikan dengan "catatan" BPK untuk Jepara, mungkin mengindikasikan bahwa aspek-aspek SPI yang diukur benar-benar dianggap sebagai, atau dalam praktiknya merupakan, penghambat daripada pendukung kualitas pelaporan dalam konteks ini. Bisa jadi, kontrol formal yang ada begitu rumit atau tidak selaras sehingga memaksa staf ke dalam praktik yang tidak efisien atau bahkan ketidakpatuhan untuk menyelesaikan pekerjaan, yang kemudian berdampak buruk pada (atau dipersepsikan sebagai) kualitas laporan. Faktor-faktor positif lainnya (SDM, SIA, Budaya, SAP) mungkin yang mempertahankan opini WTP, tetapi sistem pengendalian yang mendasarinya bisa menjadi sumber utama inefisiensi atau risiko yang ditandai oleh BPK. Oleh karena itu, temuan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan penelitian kualitatif lebih lanjut. Studi kualitatif dapat menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh aparatur OPD Kabupaten Jepara terkait implementasi SPI, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual mengenai penyebab di balik pengaruh negatif yang teridentifikasi dalam penelitian kuantitatif ini. Investigasi semacam itu sangat penting sebelum mengambil kesimpulan definitif mengenai efektivitas SPI di Kabupaten Jepara.

4.9.5 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (X5) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Hasil Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada OPD Kabupaten Jepara. Dukungan statistik untuk temuan ini berasal dari hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung untuk X5 sebesar 5.206 dengan nilai signifikansi 0.000. Karena nilai t hitung (5.206) lebih besar dari nilai t tabel

(2.052) dan nilai signifikansi (0.000) lebih kecil dari 0.05, maka H5 diterima. Koefisien regresi yang positif dan signifikan sebesar 0.544 mengindikasikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki dampak positif yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan.

Interpretasi dari temuan ini adalah bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman dan konsistensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di lingkungan OPD Kabupaten Jepara, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin meningkat. Hal ini mencakup kesesuaian sistem akuntansi dengan SAP, kemampuan untuk mengidentifikasi transaksi secara cermat dan menyeluruh, ketersediaan bukti transaksi yang sah dan lengkap, serta pengklasifikasian transaksi yang tepat sesuai dengan kategori akuntansi yang ditetapkan dalam SAP. Kepatuhan terhadap SAP memastikan bahwa laporan keuangan disajikan dengan menggunakan dasar, prinsip, dan metode akuntansi yang seragam dan diakui.

Hasil penelitian ini sejalan dengan mayoritas penelitian terdahulu. Penelitian Yanti¹¹⁴ dan Triwardana¹¹⁵ menunjukkan adanya hubungan signifikan antara penerapan SAP (atau sistem akuntansi keuangan daerah yang berbasis SAP) dan kualitas laporan keuangan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Nurillah (yang menggunakan istilah "penerapan sistem akuntansi keuangan daerah") dan Pujanira¹¹⁶. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Sulaiman yang menyatakan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (yang seharusnya juga berlandaskan SAP) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Jepara. Perbedaan dengan penelitian Sulaiman ini memerlukan perhatian. Beberapa kemungkinan penjelasan untuk

¹¹⁴ Yanti et al., "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah."

¹¹⁵ Triwardana, Yusralaini, and Susilatri, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)."

¹¹⁶ Pujanira, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY."

diskrepansi ini bisa jadi adalah perbedaan dalam cakupan OPD yang disurvei, perubahan dalam tingkat pemahaman atau implementasi SAP di Kabupaten Jepara seiring waktu antara kedua studi, atau efek dari variabel 'Budaya Organisasi' yang baru diperkenalkan dalam model penelitian ini, yang mungkin berinteraksi dengan bagaimana SAP diterapkan dan dampaknya dirasakan. Penyempurnaan instrumen atau perbedaan dalam fokus analisis juga bisa menjadi faktor.

Dalam kerangka Teori Keagenan, Standar Akuntansi Pemerintahan memainkan peran krusial dalam memitigasi masalah keagenan. SAP berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi antara agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat dan DPRD) dengan menyediakan kerangka kerja, definisi, kriteria pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang seragam. Hal ini meningkatkan keterbandingan (comparability) laporan keuangan antar periode dan antar entitas pemerintah daerah, memungkinkan prinsipal untuk melakukan evaluasi kinerja agen secara lebih informatif dan objektif. SAP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menyediakan prinsip-prinsip akuntansi yang fundamental untuk menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang meliputi tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan akuntabilitas, sangat didukung oleh penerapan SAP yang konsisten dan benar.

Pengaruh SAP yang kuat dan positif dalam penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar formal merupakan pilar utama dalam upaya mencapai kualitas laporan keuangan yang tinggi. Meskipun demikian, efektivitas penerapan SAP tetap bergantung pada faktor-faktor pendukung lainnya. Kompetensi sumber daya manusia (sebagaimana temuan H1) diperlukan untuk menginterpretasikan dan menerapkan SAP dengan benar. Sistem Informasi Akuntansi yang efektif (sebagaimana temuan H2) dibutuhkan

untuk memproses data sesuai dengan ketentuan standar. Budaya organisasi yang positif (sebagaimana temuan H1) dapat mendorong komitmen terhadap kepatuhan standar. Dengan demikian, temuan positif H5, bersama dengan H1, H2, dan H4, menunjukkan bahwa berbagai elemen ini secara sinergis berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan, meskipun peran Sistem Pengendalian Intern (H3) dalam konteks penelitian ini masih menyisakan pertanyaan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa OPD Kabupaten Jepara harus terus memastikan bahwa SAP dipahami secara mendalam dan diterapkan secara konsisten di semua unit kerja. Sosialisasi berkelanjutan, pelatihan reguler, dan penyediaan pedoman teknis mengenai SAP, serta pembaruan terkait perubahan standar, menjadi sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis data diatas disimpulkan bahwa:

1. Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas LKPD (t hitung = 3.204, $Sig.$ = 0.003). Budaya organisasi yang kuat dan positif (teratur dan kolaboratif) mendorong praktik akuntansi yang baik dan dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian informal yang efektif, berpotensi mengkompensasi kelemahan SPI formal.
2. Berdasarkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas LKPD (t hitung = 2.389, $Sig.$ = 0.024). Peningkatan pemahaman peraturan dan partisipasi pelatihan SDM secara langsung meningkatkan kualitas laporan, sejalan dengan Teori Keagenan dan prinsip "kekuatan" dalam Islam.
3. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas LKPD (t hitung = 4.686, $Sig.$ = 0.000). Efektivitas SIA dalam pencatatan akurat, pengolahan data, dan penyajian informasi tepat waktu secara kuat berkontribusi pada peningkatan kualitas LKPD, serta mengurangi asimetri informasi sesuai Teori Keagenan dan relevan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan transaksi.
4. Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas LKPD (t hitung = -9.101, $Sig.$ = 0.000). Temuan ini kontradiktif, mengindikasikan kemungkinan masalah dalam desain, implementasi, efektivitas, atau persepsi SPI di OPD Kabupaten Jepara, memerlukan evaluasi mendalam.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas LKPD (t hitung = 5.206, $Sig.$ = 0.000). Tingkat pemahaman dan konsistensi penerapan SAP, termasuk kesesuaian sistem, identifikasi,

bukti, dan klasifikasi transaksi, secara langsung meningkatkan kualitas LKPD dan mengurangi asimetri informasi sesuai Teori Keagenan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Lingkup dan Generalisasi Terbatas: Penelitian ini hanya melibatkan 33 responden dari OPD di Kabupaten Jepara, sehingga hasil mungkin tidak dapat digeneralisasi ke pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda.
2. Metode Pengumpulan Data Primer: Penggunaan kuesioner tertutup membatasi kedalaman jawaban responden dan berpotensi menimbulkan bias seperti social desirability bias atau perbedaan persepsi dalam menafsirkan pertanyaan. Sifat kuantitatif data juga tidak sepenuhnya menangkap nuansa kompleks, terutama terkait temuan kontradiktif pada Sistem Pengendalian Intern.
3. Variabel yang Diteliti: Meskipun model memiliki daya jelas yang kuat (Adjusted R Square 87,6%), masih ada 12,4% variasi dalam kualitas laporan keuangan yang tidak dijelaskan oleh lima variabel independen. Ini menunjukkan keberadaan faktor-faktor lain (misalnya, kepemimpinan, komitmen organisasi, tekanan eksternal) yang tidak diteliti.
4. Desain Penelitian Cross-Sectional: Pengambilan data pada satu titik waktu tidak memungkinkan analisis perubahan atau hubungan sebab-akibat secara dinamis, sehingga studi longitudinal akan diperlukan untuk pemahaman yang lebih mendalam di masa mendatang.
5. Keterbatasan dalam Menggali Temuan Kontradiktif SPI: Metode kuantitatif tidak memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam penyebab spesifik di balik temuan pengaruh negatif Sistem Pengendalian Intern langsung dari responden. Diskusi mengenai hal ini lebih bersifat teoretis daripada didasarkan pada data primer kualitatif dari pengalaman responden.

5.3 Saran

Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara:

1. Pertahankan dan Tingkatkan Faktor Positif: Terus tingkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan relevan dan pembaruan berkala Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Perkuat Budaya Organisasi yang positif (integritas, transparansi, akuntabilitas, kolaborasi) dan pastikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dipahami serta diterapkan secara konsisten di semua unit kerja.
2. Evaluasi Komprehensif Sistem Pengendalian Intern (SPI): Lakukan evaluasi mendalam terhadap desain, implementasi, dan efektivitas SPI yang ada untuk mengidentifikasi penyebab pengaruh negatif yang ditemukan. Pertimbangkan penyederhanaan prosedur SPI agar lebih praktis tanpa mengurangi esensi pengendalian, serta tingkatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai tujuan SPI.

Bagi Peneliti Selanjutnya:

1. Perluas Lingkup dan Metodologi: Gunakan sampel yang lebih besar dan beragam (OPD atau pemerintah daerah lain) untuk meningkatkan generalisasi. Pertimbangkan penelitian longitudinal untuk menganalisis dinamika perubahan variabel dari waktu ke waktu.
2. Gunakan Metode Campuran (Mixed Methods): Kombinasikan kuantitatif dengan kualitatif (misalnya wawancara mendalam) untuk menggali lebih dalam penyebab pengaruh negatif SPI, sehingga dapat mengungkap persepsi dan pengalaman responden secara lebih kaya.
3. Kembangkan Model Penelitian: Uji variabel lain yang memengaruhi kualitas LKPD, seperti kualitas audit internal/eksternal, komitmen pimpinan, atau implementasi *e-government*. Selidiki potensi interaksi antar variabel independen, seperti moderasi budaya organisasi terhadap pengaruh SPI.
4. Lakukan Studi Komparatif/Replikasi: Lakukan studi komparatif atau replikasi (misalnya dengan penelitian Sulaiman, 2022) untuk memahami

perbedaan temuan dan berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda. "Pengaruh Etika Bisnis Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 2023.
- Andari, Desak Putu Tika Adi. "Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh." UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR, 2022.
- Anton, F X. "Menuju Teori Stewardship Manajemen." *Majalah Ilmiah Informatika* 1, no. 2 (2010).
- Astuti, Yulia Widi, Ratno Agriyanto, and Ahmad Turmudzi. "Pengaruh Kualitas Layanan, Nilai Nasabah, Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna Layanan Mobile Banking Syariah." *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia (Indonesian Journal of Marketing Science)* 19, no. 3 (n.d.): 134–58.
- Bodnar, George H, and William S Hopwood. *Accounting Information Systems*. Pearson, 2013.
- Chairina, Frista, and Tineke Wehartaty. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKPD Kota Surabaya." *Jurnal Akuntansi Kontemporer* 11, no. 1 (2019): 31–39.
- Dewi Yesiana Rahman, Erlin Rohmawati, Ninis Sriyani, & M. Masrukhan. "PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN." *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 11, no. 7 (2024): 110–120.
<https://doi.org/10.8734/musytari.v11i7.8228>.
- Djuanda, Vincentius David. "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Perilaku Manajer Atas Isu Manajemen Lingkungan Sebagai Variabel Interveningnya." Petra Christian University, 2016.
- Dyanasari, Asnah. "Pengantar Ilmu Ekonomi Makro." *Yogyakarta: Deepublish*, 2021.
- Eisenhardt, Kathleen M. "Building Theories from Case Study Research." *Academy of Management Review* 14, no. 4 (1989): 532–50.
- Fama, Eugene F, and Michael C Jensen. "Separation of Ownership and Control." *The Journal of Law and Economics* 26, no. 2 (1983): 301–25.
- Gelinas, Ulric J, Richard B Dull, and Patrick Wheeler. *Accounting Information Systems*. Cengage AU, 2018.
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23,"

2016.

- Hall, James A. *Accounting Information Systems*. Cengage Learning, 2011.
- Hehanussa, Salomi Jacomina. *Akuntansi Sektor Publik*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- Hoesada, Jan. “Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan.” *Jakarta: Salemba Empat* 238 (2016).
- Indrasari dan Ismunawan. “Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2022): 27–38.
<https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i1.732>.
- Indrisari & Nahartyo. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal SNA. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang*, 2008.
- Inwanda, Dani, M Cholid Mawardi, and Arista Fauzi Kartika Sari. “Pengaruh Teknologi Informasi, Budaya Organisasi Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang).” *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 13, no. 02 (2024): 759–67.
- Inwanda et al. “Pengaruh Teknologi Informasi, Budaya Organisasi Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang)” 13, no. 02 (2016): 1–23.
- Jensen, Michael C, and William H Meckling. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” In *Corporate Governance*, 77–132. Gower, 2019.
- Jogiyanto, Hartono M. *Analisis Dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis)*. Penerbit Andi, 2017.
- Kansah, Dinda Dwi, Tri Hesti Utaminingtyas, and Achmad Fauzi. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (2023): 405–19.
- Mardiasmo, M B A. *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2021.
- Modo, Sintike Mentari, David Paul Elia Saerang, and Agus Tony Poputra. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud).” *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING GOODWILL* 7, no. 2 (2016).

- Mokoginta, Novtania, Linda Lambey, and Winston Pontoh. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2017).
- Nurillah, As Syifa, and Dul Muid. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)." Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014.
- O'brien, A. James., and Marakas, M. George. *Introduction to Information Systems. 16th Edition*, 2014.
- Partono. "Laporan Keuangan Pemerintah: Upaya Menuju Transparansi Dan Akuntabilitas." *Media Akuntansi*, 2000.
- Possumah, Lenny, Siti, Noor Khikmah, Yustina Hiola, Fitria, Magdalena Suprapto, Helmi Toatubun, et al. *AUDITING AUDITING Editor: Siswadi Sululing*, 2024.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin, Kartika Marella Vanni, and Anjar Mustika. "Dividend Policy as an Intervening Variable between Return on Asset and Earning per Share on Stock Prices." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 6, no. 2 (2024): 268–71.
- Pudjiastuti, Enni, and Untung Sriwidodo. "Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja SMP Negeri 1 Purwodadi Grobogan." *Jurnal Sumber Daya Manusia* 5, no. 2 (2011): 120–31.
- Pujanira. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 6, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>.
- Putri, Ridha Rahmadita, and Anang Subardjo. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6, no. 12 (2017).
- Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik*. Rajawali Pers, 2009.
- Romney, Marshall B. "Dan Paul John Steinbart. 2015." *Accounting Information System*, n.d.
- Romney, Marshall B, and Paul John Steinbart. "Sistem Informasi Akuntansi." Jakarta: Salemba Empat 3, no. 01 (2015).
- Romney, Marshall, Paul Steinbart, Joseph Mula, Ray McNamara, and Trevor Tonkin. *Accounting Information Systems Australasian Edition*. Pearson

- Higher Education AU, 2012.
- Rosalin, Faristina, and Warsito Kawedar. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada BLU Di Kota Semarang)." Universitas Diponegoro, 2011.
- Roviyantie. "Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 78-90., 2011.
- Saadah, Naili. "Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 21, no. 01 (2018): 18–27.
- Saputri, Haria, Ujang Kusnaedi, and Yandi Asmana. "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Di Jakarta Utara." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023): 102–9.
- Setiawan. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang." *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan* 1, no. 1 (2016): 24.
<https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301>.
- Setyowati et al. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 20, no. 2 (2016): 179–91.
<https://media.neliti.com/media/publications/144499-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas.pdf>.
- Siregar, Syofian. "Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & Spss," 2015.
- Srimindarti, Ceacilia. "Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan." *Fokus Ekonomi* 7, no. 1 (2008): 24451.
- Sulaiman, Rachmat Luthfi, and Nashirotun Nisa Nurharjanti. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Suriani, Nidia, and M Syahran Jailani. "Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 24–36.
- Syahrani, Abdul Wahab, M Ma'ruf Abdullah, and Rahmi Widyanti. "Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan." *Al-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN* 1, no. 1 (2014): 17–33.
- Tantri. "Evaluasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Instansi Pemerintahan:

- Studi Kasus Di Kabupaten Dan Kota Semarang.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2012.
- Triwardana. “KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar).” *JOM Fekon* 4, no. 1 (2017): 641–55.
- Triwardana, Dhedy, Yusralaini Yusralaini, and Susilatri Susilatri. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar).” Riau University, 2017.
- Untary, Nurendah Ragillita, and Moh Didik Ardiyanto. “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang).” Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2015.
- wati et al. “Pengaruh_Kompetensi_SDM_Penerapan_Sap_Da” 2 (2014).
- Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati, S E Ak, and N I KADEX SINARWATI. “Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 2, no. 1 (2014).
- Wilda Maysaroh, Katin, and M A Wahyono. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Pada SKPD .” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Yanti et al. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 1–8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>.
- Yesinia, Nur Ida, Norita Citra Yuliarti, and Dania Puspitasari. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang).” *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* 10, no. 1 (2018): 105–12.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

A. Surat Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/
Bendahara/Praktisi Bidang Keuangan dan Akuntansi
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara
Di Tempat

Dengan penuh rasa hormat,

Berkaitan dengan upaya pemenuhan persyaratan akademis untuk penyelesaian skripsi, saya memiliki maksud untuk menyelenggarakan sebuah penelitian. Riset ini akan melibatkan partisipasi dari para Bendahara atau praktisi yang menangani aspek keuangan dan akuntansi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Kabupaten Jepara. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah: "**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, BUDAYA ORGANISASI DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH** (Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara)".

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya sangat mengharapkan kerelaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan menyediakan sedikit waktu guna mengisi kuesioner yang telah saya siapkan.

Perlu saya tegaskan bahwa pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan penyusunan skripsi dan tidak untuk tujuan lainnya. Mengingat signifikansi data yang dibutuhkan, saya memohon agar pengisian kuesioner ini dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Saya, selaku peneliti, berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan seluruh identitas dan jawaban yang diberikan oleh setiap responden.

Atas segala bentuk kerja sama, waktu, dan partisipasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i curahkan, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Saya

Muhammad Tegar Surva Sudarsono

B. Identitas Responden

Berilah tanda ceklist (v) pada salah satu kolom yang akan diisi.

1. Nama :
2. Usia : 20 – 30 Tahun
 31 – 40 Tahun
 41 – 40 Tahun
 51 – 60 Tahun
3. Agama :
4. Jenis kelamin : Laki - laki Perempuan
5. Pendidikan Terakhir : SMA / SMK
 D-3
 S-1
 S-2
6. Nama instansi / OPD :
7. Jabatan :
8. Masa kerja : < 1 Tahun
 1 – 5 Tahun
 6 – 10 Tahun
 > 10 Tahun

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Demi kelancaran dan validitas data yang terkumpul, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memperhatikan beberapa petunjuk berikut sebelum melanjutkan pengisian kuesioner ini:

1. Pemahaman Mendalam: Mohon luangkan waktu untuk membaca setiap item pernyataan secara cermat guna memastikan pemahaman yang akurat sebelum memberikan respons.
2. Seleksi Respons Tunggal: Tentukan satu opsi jawaban yang paling tepat dan paling mencerminkan perspektif atau kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk setiap pernyataan.
3. Metode Penandaan Jawaban: Silakan indikasikan pilihan jawaban Anda dengan membubuhkan tanda cek (✓) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan respons Anda.
4. Kelengkapan Jawaban: Kami sangat menghargai jika seluruh item pernyataan dapat dijawab. Mohon untuk berupaya mengisi semua pertanyaan dan tidak ada yang terlewatkan.
5. Pengisian Secara Pribadi: Partisipasi dalam pengisian kuesioner ini bersifat individual. Oleh karena itu, pengisian tidak dapat dialihkan atau diwakilkan kepada orang lain.
6. Kualifikasi Partisipan yang Diharapkan: Kuesioner ini secara spesifik ditujukan bagi individu yang memenuhi kriteria berikut:
 - Merupakan pegawai yang bertugas di salah satu unit Organisasi Pem Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
 - Merupakan aparatur akuntansi di salah satu Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) kabupaten Jepara
7. Keterangan bobot penilaian:

Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1

Tidak Setuju (TS) : Skor 2

Netral (N) : Skor 3

Setuju (S) : Skor 4

Sangat Setuju (SS) : Skor 5

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Laporan keuangan disajikan secara relevan dengan kebutuhan pengguna.					
2.	Informasi dalam laporan keuangan andal (bebas dari kesalahan material).					
3.	Laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode atau antar entitas.					
4.	Laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami.					
5.	Penyajian laporan keuangan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.					
6.	Laporan keuangan mencerminkan kinerja organisasi secara akurat.					

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pegawai memiliki pemahaman mendalam tentang Standar Akuntansi Pemerintahan					
2.	Pegawai mendapatkan pelatihan berkala terkait penyusunan laporan keuangan.					

3.	Pegawai mampu mengidentifikasi dan mencatat transaksi keuangan sesuai SAP.				
4.	Pegawai dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam situasi transaksi keuangan yang kompleks.				
5.	Pegawai memiliki kemampuan analisis untuk menyelesaikan masalah akuntansi.				
6.	Pelatihan yang diberikan memperbarui pengetahuan pegawai mengenai perubahan terbaru dalam regulasi akuntansi pemerintah.				

3. Sistem Informasi Akuntansi

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sistem Informasi Akuntansi di organisasi saya didukung oleh perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi secara efektif dengan kebutuhan perusahaan.					
2.	Sumber daya manusia di departemen akuntansi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengoperasikan teknologi sistem informasi akuntansi sesuai dengan prinsip amanah.					
3.	Pencatatan transaksi keuangan dalam sistem informasi akuntansi di organisasi saya menerapkan prinsip transparansi.					
4.	Sistem pencatatan jurnal digital di organisasi saya memiliki kontrol yang efektif untuk meminimalkan kesalahan manusia (human error) dan menjunjung nilai keadilan.					

5.	Laporan keuangan yang dihasilkan dari Sistem Informasi Akuntansi di organisasi saya memenuhi aspek akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual.					
6.	Informasi finansial yang dihasilkan dari Sistem Informasi Akuntansi membantu pengambilan keputusan strategis yang selaras dengan prinsip kemaslahatan dan profesionalisme.					

4. Sistem pengendalian intern

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam proses akuntansi jelas.					
2.	Kebijakan pengendalian intern (seperti otorisasi transaksi) diterapkan dengan baik.					
3.	Pembagian tugas dalam proses akuntansi dirancang untuk meminimalkan risiko tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab.					
4.	Terdapat mekanisme pengawasan untuk mencegah kecurangan keuangan.					
5.	Laporan keuangan direview oleh pihak independen sebelum disahkan.					
6.	Kebijakan akuntansi yang ditetapkan instansi memberikan kejelasan dalam penerapan standar akuntansi untuk memastikan konsistensi laporan keuangan.					

5. Budaya Organisasi

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Organisasi saya memiliki struktur pelaporan keuangan yang jelas dengan pembagian tanggung jawab pada setiap level sesuai dengan prinsip amanah.					
2.	Prosedur dan standar operasional dalam pelaporan keuangan dipatuhi secara ketat untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan.					
3.	Organisasi saya memiliki sistem pengawasan berjenjang yang efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.					
4.	Nilai-nilai kekeluargaan dan kerja sama dalam organisasi mendorong keterbukaan dalam mengidentifikasi kesalahan pelaporan keuangan.					
5.	Karyawan di organisasi saya didorong untuk berkolaborasi dan saling membantu dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.					
6.	Organisasi saya menumbuhkan rasa kepercayaan dan nilai bersama yang menciptakan lingkungan kondusif untuk transparansi dalam pelaporan keuangan.					

6. Standar Akuntansi Pemerintahan

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).					

2.	Setiap transaksi didukung oleh dokumen/bukti yang sah.				
3.	Klasifikasi transaksi keuangan sesuai dengan SAP.				
4.	Terdapat pedoman tertulis untuk penerapan SAP di organisasi.				
5.	Penerapan SAP dievaluasi secara berkala untuk perbaikan.				
6.	Terdapat pelatihan berkala mengenai standar akuntansi bagi pegawai yang terlibat.				

Lampiran 2. Tabulasi data

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTAL X1
4	5	4	3	4	5	25
4	3	4	4	4	4	23
4	5	5	4	4	5	27
4	4	5	4	4	3	24
4	4	4	4	4	3	23
4	4	5	4	4	5	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	4	3	4	22
5	4	4	4	4	4	25
5	2	5	4	5	3	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	5	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	3	4	3	21
4	4	4	4	4	4	24
4	3	3	3	3	4	20
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	5	25
5	3	3	5	4	5	25
4	4	5	5	5	5	28
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	5	4	5	28
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	4	19
4	3	4	4	4	4	23
4	2	4	4	3	4	21
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	3	4	23
4	5	5	5	5	5	29
4	5	5	5	5	4	28
4	4	4	3	3	3	21

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL X2
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	5	5	4	27
3	4	4	4	4	4	23
4	4	4	3	4	4	23
5	5	5	4	4	4	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	4	4	4	25
4	5	4	4	4	4	25
5	5	5	5	4	4	28
4	4	4	5	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	5	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	3	4	4	23
4	4	4	4	4	4	24
4	3	3	3	3	3	19
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	5	26
4	4	5	5	5	5	28
5	5	5	5	5	5	30
4	5	4	5	5	5	28
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	3	4	3	21
4	5	5	4	4	4	26
4	4	5	4	5	4	26
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	5	5	26
3	3	4	3	3	3	19

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TOTAL X3
5	5	5	4	4	4	27
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	4	3	23
5	5	4	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	4	25
4	4	4	3	3	3	21
5	4	4	4	4	4	25
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	4	3	23
4	4	4	4	4	3	23
5	4	4	4	4	4	25
5	4	4	4	4	4	25
5	4	4	4	4	4	25
4	3	3	3	3	3	19
5	5	5	4	4	4	27
4	4	4	4	3	3	22
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	3	23
4	4	4	4	4	3	23
5	5	5	5	4	4	28
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	4	29
5	4	4	4	4	4	25
4	3	3	3	3	3	19
5	5	5	4	4	4	27
5	5	5	5	5	4	29
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	4	29
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	3	3	22

X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	TOTAL X4
3	5	5	3	3	3	22
5	5	5	5	5	5	30
4	4	3	4	4	4	23
4	4	4	5	5	4	26
4	3	4	3	4	4	22
4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	4	4	25
4	4	4	4	4	5	25
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
3	3	4	4	4	4	22
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	3	4	4	23
3	4	4	4	5	5	25
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	3	4	23
4	5	4	4	4	5	26
4	4	5	4	5	4	26
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	4	5	5	29
4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	5	5	5	29
4	4	3	3	3	4	21

X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	TOTAL X5
4	5	4	4	4	5	26
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	3	4	4	26
4	5	4	3	4	4	24
4	4	4	4	4	3	23
5	5	5	3	3	4	25
5	5	5	4	4	4	27
4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	5	5	4	28
5	5	4	4	4	5	27
4	5	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	4	5	4	4	5	27
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	3	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	3	28
5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	4	4	3	25
4	4	4	3	3	4	22
5	5	5	5	4	4	28
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	3	3	3	22
5	5	4	4	4	4	26
4	5	4	4	4	4	25
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	4	4	28
4	4	4	4	4	4	24

Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	TOTAL Y
4	4	4	4	4	5	25
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	5	4	4	26
4	3	4	4	4	4	23
4	4	3	4	4	4	23
4	5	5	4	5	5	28
5	5	5	5	4	5	29
4	4	4	4	4	4	24
5	3	4	4	4	3	23
5	4	5	5	4	4	27
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	5	5	4	27
5	4	4	4	4	4	25
5	5	5	5	4	3	27
4	3	3	4	4	4	22
4	4	4	4	5	4	25
5	5	5	5	5	5	30
4	5	4	5	5	4	27
4	4	5	5	5	3	26
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	4	25
5	3	4	5	4	4	25
4	2	4	4	4	4	22
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	5	4	4	25
4	4	4	5	4	5	26
5	5	5	4	4	4	27
4	3	4	4	3	4	22

Lampiran 3. Uji kelayakan instrumen

A. Uji Reabilitas

1. Kualitas laporan keuangan (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
,867	6

2. Kompetensi sumber daya manusia (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
,881	6

3. Sistem informasi akuntansi (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
,884	6

4. Sistem pengendalian intern (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
,891	6

5. Budaya organisasi (X4)

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
,897	6

6. Standar akuntansi pemerintahan (X5)

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
,918	6

Lampiran 4. Dokumentasi



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax.
E-mail : dpmtsp.jepara@gmail.com
JEPARA 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA**
NOMOR : 072/133
TENTANG
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dari UIN WALISONGO SEMARANG Nomor : 974UN.10.5D1TA.0.01032025 , perihal Ijin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

1. Nama : Muhammad Tegar Surya Sudarsono
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. NIM : 2105046035
4. Alamat : Ds. Ngasem RT 24 03 Kec. Batealit Kab. Jepara
5. Nama Lembaga : UIN Walisongo Semarang
6. Penanggung Jawab : Muchamad Fauzi
7. Maksud dan Tujuan : Izin penelitian penyebaran kuesioner di organisasi perangkat daerah kabupaten Jepara
8. Judul Penelitian : PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, BUDAYA ORGANISASI DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN JEPARA)
9. Anggota Penelitian : -
10. Lokasi : Organisasi perangkat daerah kabupaten Jepara

Dengan Ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
2. Sebelum melaksanakan penelitian langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pimpinan wilayah setempat.
3. Setelah penelitian selesai, agar memberitahu dan memberikan hasil penelitian kepada Bakesbangpol Kabupaten Jepara.
4. Surat keterangan penelitian ini berlaku tanggal 19-03-2025 s/d 19-06-2025

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal : 20 Maret 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197007011990031007



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSKB-BSSN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Tegar Surya Sudarsono
Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 6 April 2005
Alamat Asal : Desa Ngasem RT 024/ RW 003 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara
Alamat Domisili : Klampisan Rt4 Rw2, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50181
No. Telepon : 089672898866
Email : tegargoc@gmail.com